

**PEMBERDAYAAN DESA ADAT SANUR DALAM  
PENATAAN KAWASAN PANTAI MATAHARI TERBIT  
DALAM KAITANNYA DENGAN PARIWISATA**



Tesis

Magister Ilmu Lingkungan

Nyoman Linggih Warsana  
NIM : L4K001108

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**AGUSTUS  
2002**

TESIS

**PEMBERDAYAAN DESA ADAT SANUR DALAM  
PENATAAN KAWASAN PANTAI MATAHARI TERBIT  
DALAM KAITANNYA DENGAN PARIWISATA**

Lokasi Pantai Sanur

disusun oleh

Nyoman Linggih Warsana  
NIM : L4K001108

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 23 Agustus 2002  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

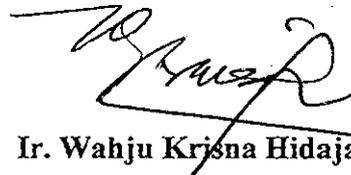
Menyetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Boedi Hendrarto

Pembimbing Kedua



Ir. Wahyu Krisna Hidajat, MT



Judul Tesis : Pemberdayaan Desa Adat Sanur Dalam Penataan Kawasan Pantai Matahari Terbit Dalam Kaitannya Dengan Pariwisata.

Nama Mahasiswa : Nyoman Linggih Warsana

Nomor Mahasiswa : L4K001108

Program Studi : Magister Ilmu Lingkungan

Konsentrasi : Perencanaan Lingkungan

Tesis ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 23 Agustus 2002 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

1. Pembimbing Utama



Dr. Boedi Hendarto

2. Pembimbing Kedua



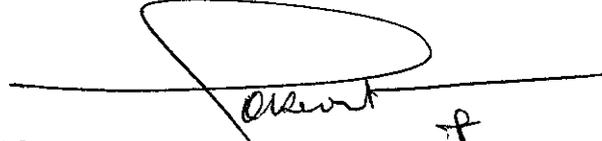
Ir. Wahyu Krisna Hidajat, MT

3. Penguji

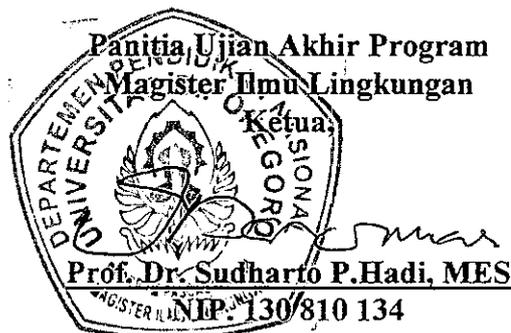


Prof. Dr. Sudharto P.Hadi, MES

4. Penguji



Dr. Ir Purwanto, DEA



## **PERNYATAAN**

**Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.**

**Semarang, 14 Agustus 2002**

**Nyoman Linggih Warsana**

## RIWAYAT HIDUP



Nyoman Linggih Warsana lahir di Kintamani Kabupaten Bangli Propinsi Bali, pada tanggal 11 Nopember 1959. Menamatkan pendidikan SD.Negeri No. 19 Singaraja tahun 1972, ST. Negeri Singaraja dengan jurusan teknik mesin tahun 1975, STM Saraswati Denpasar dengan jurusan teknik mesin tahun 1979.

Akademi Teknik Surabaya jurusan teknik mesin tahun 1983. Tahun 1995 menyelesaikan pendidikan S1 jurusan teknik mesin di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.

Pada tahun 1985 mulai bekerja di Proyek Air Bersih Bali di bawah Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Bali. Jabatan yang pernah dipercayakan adalah Kepala Bagian Teknik BPAM Klungkung (1985-1988), Direktur Teknik PDAM Klungkung (1996-1999) dan Pemimpin Proyek Air Bersih Kabupaten Klungkung (1997-1998). Tahun 1999 dipindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali sebagai staf seksi tata ruang sampai sekarang.

Studi banding yang pernah diikuti diantaranya tahun 1995 ke Batam, Singapura dan Malaysia, masalah pembangunan sarana dan prasarana perkotaan. Direksi PDAM se-Bali pada tahun 1996 studi banding masalah manajemen pengelolaan air bersih ke Batam, Singapura dan Bangkok. Pada tahun 2002 ikut praktek kerja lapangan Magister Ilmu Lingkungan UNDIP ke Batam, Singapura dan Johorbahru.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan, dihadapan Ide Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) atas karunia-Nya sehingga tesis ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

Dalam penelitian ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa motivasi, bimbingan, masukan, dan saran-saran. Karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro, Koordinator Program Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Lingkungan beserta staf karena jabatannya telah memberi kemudahan kepada penulis selama mengikuti kuliah dan menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Boedi Hendarto sebagai pembimbing pertama dan Ir. Wahyu Krisna Hidajat, MT sebagai pembimbing kedua yang secara teliti dan bijaksana memberikan motivasi dan petunjuk yang berguna dalam penyelesaian tesis ini.
3. Para dosen dan rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini, atas dorongan, bantuan, dan kerja sama yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan semestinya.
4. Pemerintah Daerah Propinsi Bali yang memberi bantuan dana, Ir. I Wayan Subagiarta Kepala Dinas PU Propinsi Bali yang telah memberi rekomendasi dan izin studi.

5. Ni Wayan Redari, S.Sos (istri) dan Luh Merry Dyanthi (anak) yang dengan sabar dan tulus memberikan motivasi serta dorongan selama penulis kuliah pada Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna. Untuk itu sangat diharapkan kritik-kritik dan saran-saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga tesis ini bermanfaat, baik untuk studi ilmu lingkungan pada umumnya maupun untuk studi pemberdayaan masyarakat/desa adat.

Semarang, 14 Agustus 2002.

Penulis

Nyoman Linggih Warsana.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
RIWAYAT HIDUP .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAKS .....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Perumusan masalah .....	3
1.3. Originalitas penelitian .....	4
1.4. Tujuan, sasaran dan manfaat penelitian .....	5
1.5. Lingkup Penelitian .....	6
1.6. Hipotesa atau proposisi .....	6
1.7. Sistematika pembahasan .....	7
1.8. Kerangka Pemikiran .....	8

## **BAB II LANDASAN TEORI**

2.1. Pembangunan berkelanjutan .....	10
2.2. Pemberdayaan .....	12
2.3. Peran serta masyarakat.....	14
2.4. Desa adat.....	17
2.5. Pariwisata .....	19
2.6. Penataan kawasan .....	21

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. Metoda penelitian, lokasi dan pengambilan sampel.....	23
3.2. Penelitian kepustakaan.....	25
3.3. Penelitian lapangan/pengumpulan data .....	25
3.4. Metoda analisis .....	27
3.5. Tahap penyimpulan/pelaporan.....	27
3.6. Definisi konsep .....	28
3.7. Definisi operasional .....	28

## **BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN DAN SEKITARNYA**

4.1. Letak Geografis, kependudukan, pendidikan dan kesempatan kerja.....	32
4.2. Kegiatan pariwisata yang mempengaruhi pantai Sanur .....	33
4.3. Perspektif kawasan Sanur .....	35
4.4. Pelestarian ( <i>heritage</i> ) bangunan bersejarah di Sanur .....	35

4.5. Perspektif kawasan Pantai Matahari Terbit (PMT) .....	36
4.6. Pola pendanaan kawasan PMT .....	38
4.7. Pemeliharaan pantai oleh Proyek Pengamanan Pantai Bali .....	39

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1. Analisis pemberdayaan desa adat Sanur.....	40
5.1.1. Lembaga kemasyarakatan .....	41
5.1.2. Tujuan pengembangan PMT .....	45
5.1.3. Proses pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan PMT....	46
5.1.4. Manajemen pengelolaan PMT .....	51
5.1.5. Pengujian dengan teori perencanaan .....	55
5.2. Analisis fungsi lingkungan sebelum dan sesudah penataan PMT .....	59
5.3. Perbedaan kunjungan wisatawan sebelum dan sesudah penataan PMT.....	62

## **BAB VI PENUTUP**

6.1. Kesimpulan.....	67
6.2. Rekomendasi.....	68

DAFTAR PUSTAKA .....	70
----------------------	----

LAMPIRAN.....	73
---------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. PETA LOKASI DAN GAMBAR	
L.1. Peta kawasan pariwisata di Pulau Bali .....	73
L.2. Peta Kota Denpasar .....	74
L.3. Peta penggunaan tanah kawasan Sanur .....	75
L.4. Peta tempat-tempat suci kawasan pariwisata Sanur .....	76
L.5. <i>Site Plan</i> Kawasan PMT .....	77
L.6. Kondisi lingkungan sebelum penataan PMT .....	78
L.7. Kondisi existing sesudah penataan PMT .....	79
L.8. Proses pemberdayaan desa adat Sanur dalam rangka penataan PMT .....	81
TABEL-TABEL PERHITUNGAN DAN KUISIONER	
L.9. Tabel Evaluasi hasil kuisisioner .....	82
L.10. Tabel Hasil <i>print out</i> pengolahan data dengan SPSS yang akan dianalisis .....	83
L.11. Analisis data dengan indikator pembangunan sarana dan prasarana .....	84
L.12. Analisis data dengan indikator kondisi lingkungan .....	85
L.13. Analisis data dengan indikator kondisi fisik bangunan .....	86
L.14. Tabel perhitungan kunjungan wisatawan ke PMT .....	87
L.15. Contoh kuisisioner .....	88
L.14. Surat tugas .....	92

## ABSTRAK

Kawasan Pantai Matahari Terbit (PMT) Sanur berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan adanya degradasi lingkungan, sehingga desa adat Sanur memberdayakan masyarakatnya untuk mengelola kawasan PMT.

Tujuan Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan kawasan PMT yang berwawasan lingkungan dan untuk mengetahui pengaruh pelestarian lingkungan terhadap kunjungan wisatawan di PMT.

Tipe penelitian adalah kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis menggunakan kualitatif dan kuantitatif (statistik non parametrik). Secara keseluruhan pengumpulan data menggunakan teknik *Triangulasi*, yaitu suatu prosedur yang menggunakan lebih dari satu metode secara independen, sehingga informasi dan data yang diperoleh dapat saling melengkapi. Metode tersebut antara lain adalah kuesioner, wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil pengujian variabel fungsi lingkungan dengan *Wilcoxon Signed Ranks Test statistics* menunjukkan perbedaan yang sangat-sangat nyata ( $P < 0.001$ ) sebelum dilakukan penataan kawasan PMT dengan sesudah dilakukan penataan kawasan PMT.

Analisis terhadap ketiga variabel yaitu Pemberdayaan, Fungsi Lingkungan dan Kunjungan Wisatawan dapat disimpulkan bahwa : pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan kawasan PMT telah berhasil melibatkan masyarakat sejak awal perencanaan, baik sebagai obyek maupun subyek, jumlah kunjungan wisatawan meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, kualitas fungsi pelestarian lingkungan menjadi lebih baik.

Sumber daya manusia pengelola Badan Usaha Milik Desa Adat, perlu ditingkatkan dalam bentuk pelatihan/kursus tentang administrasi keuangan dan manajemen. Keberhasilan pemberdayaan desa adat Sanur bisa dipakai sebagai contoh bagi desa-desa yang lain. Pemerintah agar mempublikasikan keberhasilan pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan PMT sehingga desa adat Sanur bisa sebagai obyek studi banding.

## ABSTRACT

*Pantai Matahari Terbit (PMT)* area in Sanur is in a poor condition (environmentally degraded). Therefore the community of *Desa Adat Sanur* developed the area.

The aims of the study were; to find out *Desa Adat Sanur* empowerment in establishing *PMT* area based on the environment protection; and to find out the influence of environment preservation on tourist visit at the beach.

Type of this study is qualitative and quantitative. This study used triangulation method to gain data and information that contributed multidimension views of the study objects. Data were collected by questionnaires, interviews, direct observation for primary data, and library research. Both qualitative and quantitative statistical tests were used in analyzing data. Wilcoxon signed rank statistical test showed that the difference of *PMT* establishment before and after implementation of empowerment of the Sanur community is very highly significant ( $P < 0.001$ ).

Based on analysis on the three variables covering Empowerment, Environment Function and Tourist Visit, it was found that : empowerment of *Desa Adat Sanur* resulted community involvement started from planning inception, whether as object or subject. This resulted in the increase in tourist visit, in order to increase of community prosperity, better quality of environment function.

Human resources of *Desa Adat Agency* needs to be improved by finance administration and management training. The success of *Desa Adat Sanur* empowerment can be used as an example for other areas. Besides, the government should disseminate such success, therefore *Desa Adat Sanur* can be used as a place of comparative study.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan, maka wilayah pesisir mempunyai arti yang sangat penting karena 65 % penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir dan wilayah pesisir mempunyai sumberdaya alam yang sangat kaya serta beragam. Selain itu wilayah pesisir mempunyai peruntukan yang baik untuk bermacam kegiatan, antara lain: permukiman, pariwisata, budidaya perikanan, transportasi dan pelabuhan (Rokhmin Dahuri dkk. 2001 : 2).

Wilayah pesisir sangat rentan terhadap terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, salah satunya adalah seperti yang terdapat di pulau Bali. Untuk mengatasi dan meluasnya permasalahan ekosistem pesisir, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, pada tanggal 20 Nopember 1996 di Nusadua, Bali telah mencanangkan program nasional pantai lestari. Program ini merupakan program aksi pengendalian dampak lingkungan pesisir yang meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini didukung dengan adanya perubahan tatanan sistem pemerintah dan pembangunan dengan dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk ini peran pemerintah harus ditingkatkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan yang lebih

demokratis. Hal ini identik dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan yang harus dipikul bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan akan memungkinkan terwujudnya keseimbangan baru antara peranan pemerintah dengan peran masyarakat (*public private partnership*).

Kawasan pesisir pantai merupakan salah satu kawasan budi daya yang ditetapkan untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan pesisir pantai yang berfungsi sebagai kawasan budi daya merupakan daerah yang tersentuh tangan manusia, dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia.

Kawasan Pantai Sanur Bali, merupakan salah satu dari sekian banyak kawasan pantai yang terkenal di Indonesia. Pantai ini penting bagi masyarakat Bali karena selain untuk menunjang kegiatan pariwisata juga untuk kepentingan kegiatan keagamaan (upacara adat). Kawasan Pantai Sanur dewasa ini sebagian besar telah dikelola oleh swasta (*investor*), sehingga sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan pantai yang berfungsi sebagai pantai rakyat. Salah satu yang masih tersisa sebagai pantai rakyat di kawasan pantai Sanur adalah Pantai Matahari Terbit. Pengelolaan pantai ini adalah dengan memberdayakan masyarakat melalui Desa Adat, serta didukung dengan pernyataan tertulis dari Pemerintah Propinsi Bali, karena sebagian tanah di lokasi ini milik negara (khususnya lokasi hutan bakau). Pantai Matahari Terbit merupakan pantai di Kawasan Pantai Sanur yang memiliki otonomi dengan memberdayakan desa Adat Sanur sebagai pengelolaannya. Pengertian desa adat

disini adalah suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan agama Hindu, dan merupakan satu kesatuan wilayah dimana para anggotanya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang ditata oleh suatu sistem budaya (Pitana 1994 : 139).

Yang menjadi masalah adalah Kawasan Pantai Matahari Terbit berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan (terjadinya degradasi lingkungan) sehingga tidak menunjang aktifitas wisata di lingkungannya. Bagian pantai ini menjadi tempat *ngaben* (upacara pembakaran jenazah) dan *melasti* (upacara pembersihan ke laut) dan sekaligus menjadi tempat beroperasinya sejumlah warung rakyat yang seharusnya dapat menjadi *asset* yang potensial. Akan tetapi kondisi pantai tidak terpelihara dan tertata dengan baik. Pantai ini menyisakan hutan bakau yang kotor karena pembuangan sampah yang tidak terkendali, mengalami abrasi cukup berat, memiliki persawahan kering yang kurang produktif, memiliki keterbatasan pemandangan laut akibat adanya tanggul penahan ombak yang terlalu tinggi, sehingga sukar bagi nelayan untuk menurunkan atau menaikkan perahu. Oleh karena itu diperlukan penataan yang lebih baik bagi pantai ini.

## 1.2. Perumusan Masalah

Proses pemberdayaan masyarakat telah dilakukan akan tetapi belum banyak di ketahui apakah yang menjadi tujuan, telah mampu membawa perubahan yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan belum terungkapnya :

- Bagaimanakah pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan kawasan Pantai Matahari Terbit yang berwawasan lingkungan ?

- Bagaimanakah pengaruh pemberdayaan desa adat Sanur terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan kunjungan wisata di kawasan Pantai Matahari Terbit ?.

Untuk menjawab pertanyaan di atas perlu dilakukan penelitian tentang keberhasilan pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan kawasan Pantai Matahari Terbit dalam memperbaiki lingkungan hidup dan meningkatkan pariwisata.

### **1.3. Originalitas Penelitian**

Sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tersebut di kawasan pariwisata Sanur belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dalam pemecahan masalah yang ada. Penelitian ini khusus mengkaji tentang keberhasilan pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan kawasan Pantai Matahari Terbit dalam memperbaiki lingkungan hidup dan meningkatkan pariwisata. Penelitian yang pernah dilakukan lingkungan akademis adalah :

1. Nengah Bawa Atmaja dari Magister Antropologi Universitas Indonesia (1992) dengan judul pelestarian kawasan hutan wisata kera di desa Sangeh Bali. Suatu telaahan tentang peranan desa adat dalam mengelola obyek wisata.
2. Eri Barlian dari Universitas Negeri Padang dalam artikel lingkungan dan pembangunan 20(4); 235-246; 2000, dengan judul peran serta masyarakat petani dalam pengelolaan lingkungan taman nasional Kerinci Seblat. Hasil analisis memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan dan penghasilan secara nyata turut menentukan dan memberikan kontribusi terhadap peran serta masyarakat dalam mengelola pelestarian lingkungan, sehingga apabila pendidikan dan penghasilan ditingkatkan maka peran serta juga akan meningkat.

## **1.4. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan**

Tujuan umum adalah untuk mengetahui pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan kawasan Pantai Matahari Terbit dalam kaitannya dengan pariwisata.

Sedangkan tujuan khusus adalah :

- Untuk mengetahui pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan kawasan Pantai Matahari Terbit yang berwawasan lingkungan.
- Untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan desa adat Sanur terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan kunjungan wisata di kawasan Pantai Matahari Terbit ?.

### **1.4.2. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan desa adat Sanur mulai dari partisipasi ide atau gagasan sampai dengan pengelolaan kawasan Pantai Matahari Terbit, dimana pelestarian fungsi lingkungan kawasan dipertahankan.

### **1.4.3. Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- Memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan bagi konseptor-konseptor pembangunan maupun bagi pemerintah dalam memperbaiki taraf kehidupan masyarakat bawah melalui sistem pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.
- Memberikan sumbangan pemikiran dalam penyempurnaan konsep pemberdayaan masyarakat sehingga mampu membangun diri dalam lingkup masyarakatnya sendiri maupun masyarakat secara umum.

- Implikasinya mampu memberikan sumbangan bagi berkembangnya konsep pengelolaan kawasan pantai lebih lanjut.

### **1.5. Lingkup Penelitian**

Berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai, penelitian dibatasi lingkungannya yaitu daerah kawasan Pantai Matahari Terbit dengan pembangunan penataan yang fungsi pelestarian lingkungan dipertahankan. Untuk mendapatkan hasil/perubahan yang diinginkan bagi seluruh masyarakat desa adat Sanur yang pada dasarnya adalah mereka yang menjadi obyek sekaligus subyek dalam proses pembangunan itu sendiri.

Sedangkan pembahasan difokuskan pada 2 lingkup pembahasan yaitu :

- Pemberdayaan dan partisipasi yang diberikan masyarakat desa adat Sanur, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu membangun dirinya sendiri, serta mampu mengatasi masalahnya sendiri di masa-masa selanjutnya.
- Program penataan kawasan Pantai Matahari Terbit yang bertujuan untuk merubah kondisi lingkungannya agar menjadi lebih baik dari keadaan sebelum perbaikan sehingga membawa dampak positif terhadap kunjungan wisatawan.

### **1.6. Hipotesa atau Proposisi**

Penataan suatu kawasan dengan sekaligus memberdayakan masyarakatnya melalui keikutsertaan mereka baik secara fisik maupun non fisik, maka masyarakat menjadi lebih mandiri, lingkungan kawasan menjadi tertata dan indah. Kerja keras dan partisipasi yang dilakukan secara nyata akan membawa perubahan yang berarti jika apa yang telah mereka sumbangkan selama ini benar-benar sesuai dengan

kebutuhan dan hati nurani mereka sendiri. Bahwa seluruh hasil penataan kawasan tersebut merupakan milik mereka yang harus benar-benar dikelola, dipelihara dan dikembangkan. Dengan demikian pemberdayaan diharapkan : *Dengan pemberdayaan desa Adat Sanur maka dapat dihasilkan penataan kawasan Pantai Matahari Terbit yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yang mendorong peningkatan kunjungan wisata.*

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

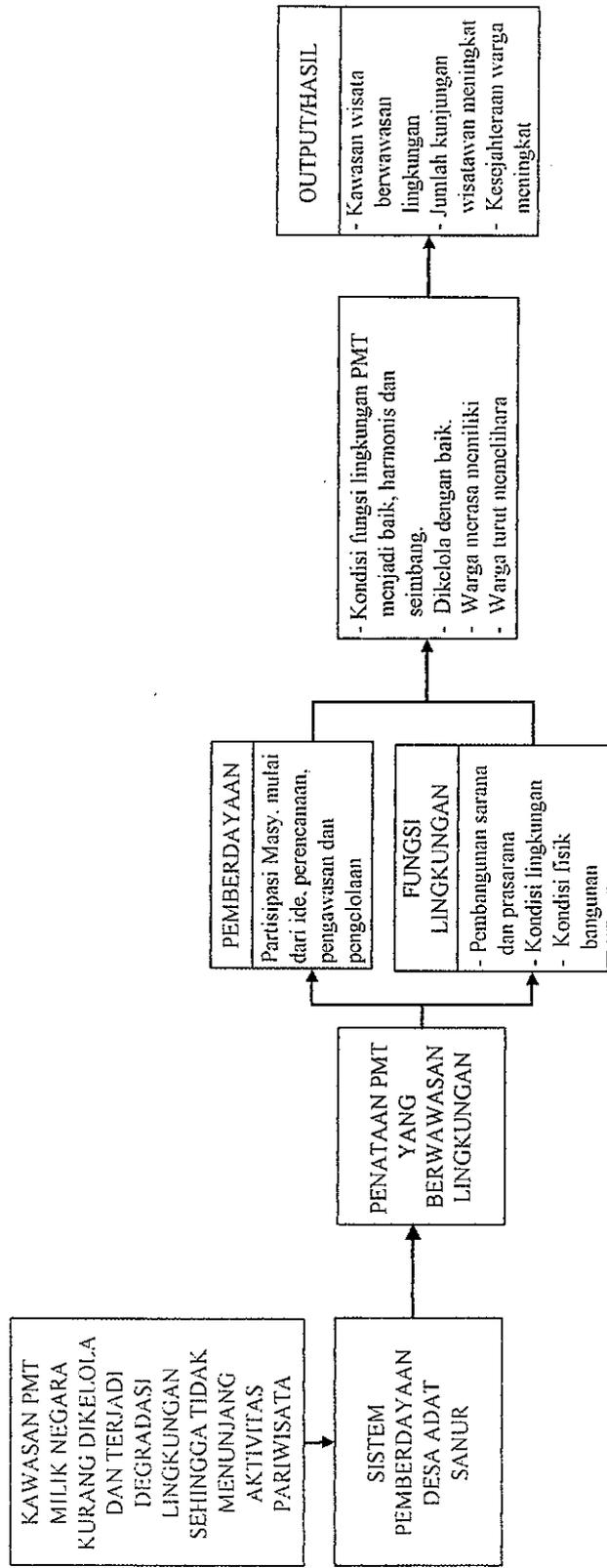
Pokok pembahasan studi ini disusun dalam enam bab dengan pola tata alur yaitu bab I adalah pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, originalitas penelitian, tujuan, sasaran dan manfaat penelitian, lingkup penelitian, hipotesa, sistematika pembahasan dan kerangka pemikiran. Pada bab II berisi landasan teori yang memperkuat definisi dari pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, desa adat, pariwisata dan penataan kawasan.

Pada bab III menerangkan tentang metodologi yang dipergunakan baik metode kualitatif maupun kuantitatif. Pada bab IV berisi tentang gambaran umum daerah penelitian dan sekitarnya obyek kawasan Pantai Matahari Terbit Sanur, baik sebelum penataan maupun setelah penataan kawasan. Sedangkan bab V hasil dan pembahasan yang berisi tentang analisis pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan kawasan Pantai Matahari Terbit yang berwawasan lingkungan, analisis fungsi lingkungan sebelum dan sesudah penataan PMT dan perbedaan kunjungan

wisatawan sebelum dan sesudah penataan PMT. Yang terakhir adalah bab VI berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi peneliti.

### **1.8. Kerangka Pemikiran**

Kawasan Pantai Matahari Terbit berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan (terjadinya degradasi lingkungan) sehingga tidak menunjang aktifitas wisata di lingkungannya. Proses pemberdayaan masyarakat telah dilakukan akan tetapi belum banyak diketahui apakah yang menjadi tujuan telah mampu membawa perubahan yang diharapkan. Sebagai pedoman dalam penelitian maka dibuat kerangka pemikiran seperti pada gambar 1.



GAMBAR 1. KERANGKA PEMIKIRAN

## BAB II

### LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori yang meliputi pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, desa adat, pariwisata dan penataan kawasan.

#### 2.1. Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Bruce Mitchell (2000: 32), pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci, yaitu :

- kebutuhan, khususnya kebutuhan fakir miskin di negara berkembang; dan
- keterbatasan, dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan

Hal ini ditegaskan Hadi (1999: 23) bahwa kegagalan implementasi manajemen lingkungan karena cirinya yang bersifat *command and control* dan *konfrontatif*, hal ini harus diubah dengan prinsip kemitraan. Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses

pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pendapat BJ.Habibie (1997: 63) pembangunan dapat dikatakan berhasil apa bila dalam proses pembangunan terjadi akumulasi nilai tambah. Pengertian nilai tambah tidak hanya terjadi dalam kegiatan fisik saja, tetapi meliputi seluruh proses kehidupan manusia.

Menurut Sajidiman Surjohadiprodo (1997: 97) kemajuan setiap Bangsa untuk makin membesarkan ekonominya untuk pemakaian sumber daya serta penggunaan ruang hidup yang makin banyak. Tidak mustahil kalau faktor lingkungan suatu ketika dapat menimbulkan masalah besar bagi kehidupan umat manusia, apabila tidak dihadapi secara sungguh-sungguh sejak sekarang.

Menurut Otto Soemarwoto (2001: 76,199,200) pengelolaan lingkungan dapatlah diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan yang dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi yang berubah-ubah disebut adaptif memperbesar kementakan kelangsungan hidup sistem yang dikelola. daya lenting sistem itu kita pertinggi. Apabila terjadi gangguan kementakan sistem untuk pulih dipertinggi sehingga pembangunan dapat berkelanjutan. Proyek tidak saja mempunyai arti penting secara nasional dan regional, melainkan juga secara lokal. Sedangkan Proyek menjadi kekuatan pendorong pembangunan daerah.

Menurut Daldjoeni (1998: 73) pembangunan atau *development* terkandung tiga unsur pengertian : perubahan, tujuan dan potensi. Dengan perubahan itu dimaksudkan adanya kemajuan dari kondisi yang kurang memuaskan menjadi yang

lebih baik. Adapun tujuannya menyangkut kepentingan manusia yang harus diperjuangkan demi tercapainya kesejahteraan. Akhirnya, potensi menyangkut dana dan daya yang terdapat dalam masyarakat untuk digunakan dalam membangun.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996: 423) pola pembangunan berkelanjutan harus dikembangkan, karena akan menjamin biaya sosial yang rendah, menjamin manfaat yang maksimal dan berkelanjutan, menjamin estafet pembangunan yang makin beraneka ragam, secara terus menerus. Ada dua persyaratan secara umum dapat disebutkan: pertama kesesuaian sosial budaya, sosial ekonomi yaitu masyarakat akan mendapat manfaat yang maksimal serta mampu memelihara. Kedua, kesesuaian ekologis akan mengikuti kecenderungan siklus alamiah.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus menjadi acuan dalam melestarikan lingkungan, maka proses dan mekanisme pengambilan keputusan dalam setiap tahapan pengelolaan lingkungan haruslah melibatkan semua pihak termasuk lembaga yang mempunyai hak dan kepentingan dengan wilayah itu. Sedangkan pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

## **2.2. Pemberdayaan**

Menurut Wahyono Ary dkk.(2001: 10) pengertian pemberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk pengembangan pilihan-

pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat nelayan terhadap lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*), yang melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya lokal (*community based resource management*).

Pemberdayaan masyarakat menurut Budi Tjahjati (2000 : 10), dengan adanya perubahan peran masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan rencana tata ruang tersebut, maka dibutuhkan proses pembelajaran, pendampingan, pembinaan maupun pengorganisasian bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah, dunia usaha, sampai pada LSM, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi. Upaya ini perlu dilakukan secara terpadu dan pemerintah dapat berperan sebagai *inisiator* dan *fasilitator*.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996: 141) dengan proses pembangunan yang terus berlanjut, justru ketidakseimbangan itu dapat makin membesar yang mengakibatkan makin melebarnya jurang kesenjangan. Dalam upaya mengatasi tantangan itu diletakkan strategi pemberdayaan masyarakat. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya.

Pemberdayaan ekonomi rakyat menurut Syarif Hidayat dkk (2001: 5), adalah pembangunan yang berbasis masyarakat (*Community Based Development/CBD*) antara lain : (a). CBD sangat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, baik

pada tahap perencanaan program, pelaksanaan, maupun pada tahap pengembangannya; (b). CBD selalu tidak memisahkan antara pembangunan fisik proyek dengan pelatihan keterampilan; (c). Sumber dana bagi CBD umumnya berasal dari: alokasi anggaran pemerintah, partisipasi pihak swasta, dan dari partisipasi masyarakat sendiri.

Berdasarkan teori pemberdayaan di atas maka pengertian pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri, sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka. Sedangkan sumber dana pembangunan dari anggaran pemerintah, partisipasi pihak swasta, dan dari partisipasi masyarakat sendiri.

### **2.3. Peran serta masyarakat**

Landasan hukum peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan untuk pertama kalinya ditegaskan dalam UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Tata Ruang, kemudian ditegaskan kembali sebagai revisi UU No. 24 tahun 1982 yaitu UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan dalam Bab III: Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat secara tegas

dimuat pada Pasal 5 ayat 1 bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan kemudian Pasal 7 menegaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan
- b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
- c. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
- d. memberikan saran pendapat
- e. menyampaikan informasi dan / atau menyampaikan laporan

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih diutamakan untuk meyakinkan masyarakat, apakah suatu prosedur dalam peraturan telah diterapkan dengan benar atau tidak. Kekuasaan masyarakat ini didasarkan bahwa lingkungan merupakan barang milik publik (*public domain*) sehingga usaha pengelolaan lingkungan tidak semata-mata menjadi urusan kelompok saja, tetapi lebih merupakan urusan publik (Djarmiko dkk, 2000: 35).

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh masyarakat dapat melibatkan dalam peran serta masyarakat tersebut, Koesnadi Harjasoemantri (1986: 49) menyatakan bahwa peran serta masyarakat selain memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan terjadinya konflik dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerima keputusan.

Selanjutnya peran serta masyarakat juga akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan pengajuan perkara ke pengadilan, karena masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir. Menurutnya agar peran serta masyarakat dapat menjadi efektif dan berdaya guna maka perlu untuk dipenuhi beberapa syarat (Koesnadi Harjasoemantri 1986: 57), yaitu :

- a. kepastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya
- b. informasi tepat waktu, suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan akhir diambil. Sehingga masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengusulkan alternatif-alternatif pilihan.
- c. informasi yang lengkap dan menyeluruh, walau isi dari suatu informasi akan berbeda tergantung dari keperluan bentuk kegiatan yang direncanakan, tetapi pada intinya informasi itu haruslah menjabarkan rencana kegiatan secara rinci termasuk alternatif-alternatif lain yang dapat diambil.

Pada hakikatnya peran serta masyarakat dalam penataan Pantai Matahari Terbit dimulai dari ide atau gagasan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan merupakan jalan untuk menghasilkan masukan dan pandangan yang berguna dari masyarakat luas yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam bidang lingkungan.

#### 2.4. Desa Adat

Dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, di Bali dikenal adanya dua pengertian Desa, yakni: Desa Dinas atau Desa Administratif adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan RI dan Desa Adat atau Desa Pakraman, merupakan desa yang mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama atau yang disebut *Kahyangan tiga* atau pura lain yang berfungsi seperti yang disebut *Kahyangan desa*.

Menurut Pitana (1994:139), desa adat mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat, dan terikat oleh adanya tiga pura utama yang disebut *Kahyangan Tiga*. Desa adat merupakan suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan agama Hindu, dan merupakan satu kesatuan wilayah dimana para anggotanya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang ditata oleh suatu sistem budaya.

Bruce Mitchel dkk (2000:253) menegaskan aspek-aspek kunci pembangunan berkelanjutan meliputi pemberdayaan masyarakat lokal, swasembada dan keadilan sosial. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah berpindah dari bentuk tradisional pengelolaan lingkungan dan sumber daya yang didominasi oleh ahli profesional dari sektor pemerintah dan swasta, menuju pendekatan yang

mengkombinasikan pengalaman, pengetahuan, pemahaman berbagai kelompok masyarakat.

Di dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Adat, disebutkan bahwa Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan tiga* (pura) yang punya wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Mantra (1992: 45) lembaga tradisional adalah lembaga-lembaga yang memberikan dukungan sosial budaya masyarakat Bali. Lembaga-lembaga itu adalah Desa Adat, Banjar Adat dan organisasi tradisional lainnya. Lembaga tradisional tersebut merupakan suatu sistem sosial yang mapan mendukung keberadaan kebudayaan Bali yang bersumber dari Hindu dan budaya Bali. Lembaga tradisional sebagai piranti atau benteng kehidupan tradisi dalam memberi warna dan irama bagi dinamika masyarakatnya akhirnya memang tidak berhenti satu sisi nilai saja. Sebab sesuai dengan konsep dan pola budaya yang dianut masyarakatnya, lembaga-lembaga tradisional itu selalu berperan mempertemukan berbagai perubahan yang terjadi dengan aspirasi yang berkembang di lingkungannya. Dengan perkataan lain, maka dapat dikatakan bahwa Desa Adat sebagai lembaga tradisional Bali merupakan media pengelola perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal.

Dari kerangka teori di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : Desa Adat Sanur sebagai salah satu desa adat yang berada di Kota Denpasar, yang memiliki

objek wisata pantai Sanur. Sebagai daerah kunjungan wisata yang pada hakekatnya menuntut adanya kelestarian terhadap lingkungan dan budaya, jika lingkungan tidak lestari, maka daya tarik wisatawan akan hilang. Akibatnya tidak ada lagi pengunjung yang datang, sehingga pada akhirnya manfaat yang selama ini diperoleh masyarakat akan hilang bahkan akan mengancam kehidupan generasi yang akan datang.

Untuk mengantisipasi dampak negatif industri pariwisata, misalnya pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal/setempat, maka salah satu upayanya melalui pendekatan kelembagaan masyarakat yaitu dengan melibatkan Lembaga Desa Adat dalam pelestarian lingkungan. Upaya ini sangat mendesak perlu dilakukan karena semua kegiatan pembangunan berbasis di wilayah Desa Adat, sehingga dengan melibatkan masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan, maka dampak negatif yang akan terjadi terhadap lingkungan akan dapat dicegah sedini mungkin. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada kesempatan untuk menentukan nasib sendiri dan pemeliharaan lingkungan, sehingga rasa keadilan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat berjalan dari generasi ke generasi.

## **2.5. Pariwisata**

Pasal 1 Undang-undang No. 9/1990 tentang kepariwisataan memberi rumusan bahwa, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Pada pasal 3 menyebutkan, penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan

diantaranya memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 2 Perda No. 3/1991 tentang pariwisata budaya, penyelenggaraan pariwisata budaya dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan adil dan merata, percaya pada diri sendiri dan perikehidupan keseimbangan, keserasian serta keselarasan yang berpedoman kepada falsafah *Tri Hita Karana* (Suasthawa Dharmayuda 2001: 157)

Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata (UU. No. 9 Bab. I pasal 1). Artinya semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan pariwisata baik yang dilakukan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Jadi semua orang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan. Apapun tujuannya yang penting perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi. (Nyoman Suamba. 2000 : 9).

Dari kerangka teori tersebut dapat disimpulkan bahwa selama ini sebagian besar potensi lembaga adat yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata hanya berperan sebagai pemungut retribusi. Padahal pengembangan potensi ini dapat melibatkan lembaga adat secara langsung, dengan menjalin kemitraan pada pengusaha-pengusaha pariwisata, baik yang berada dalam lingkup lembaga adat maupun di luar lembaga adat. Dengan kerjasama ini pelestarian desa adat Sanur dapat terjaga, demikian selanjutnya akan merupakan dukungan bagi kelanjutan dan pengembangan pariwisata budaya.

## 2.6. Penataan Kawasan

Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan aspek/pengamatan fungsional tertentu. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. (Arief Rosyidi. 2000 : 9).

Tata ruang dan lingkungan hidup mengandung arti yang sangat luas, tetapi sekaligus juga seringkali punya konotasi sempit terbatas pada perencanaan dan perancangan fisik semata-mata. Penataan ruang kota sungguh rumit dan pelik karena mau tidak mau menyangkut benturan antara pendekatan-pendekatan teknokratik komersial dan humanis. (Eko Budihardjo. 1997: 4).

Dari kerangka teori di atas, maka Penataan Kawasan Pantai Matahari Terbit, dimaksudkan untuk menata kembali kawasan menjadi lebih baik dengan pelestarian fungsi lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan kawasan Pantai Matahari Terbit yang berwawasan lingkungan dan pengaruh pelestarian lingkungan terhadap kunjungan pariwisata di Pantai Matahari Terbit. Analisa penelitian menggunakan kualitatif dan kuantitatif, yang diharapkan menghasilkan pengolahan data yang akurat dan mendalam karena adanya parameter yang diukur berkaitan baik dengan perubahan kuantitatif, fisik maupun perubahan kunjungan wisata. Dengan terjun ke lapangan secara langsung untuk mengetahui/mengamati tujuan penelitian, baik untuk melakukan wawancara langsung dengan responden atau pihak terkait, maupun pengambilan data melalui pengamatan dan daftar pertanyaan.

Dengan memakai proses berpikir secara deduktif/hal-hal yang bersifat umum, penelitian ini akan dimulai dengan proses pencarian data. Data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan. Dan data sekunder diperoleh melalui data-data dari lembaga-lembaga formal maupun non formal. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan melakukan wawancara terstruktur dan semi terbuka. Yaitu wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan dengan alternatif jawaban semi terbuka sebagai *guidance*. Dalam hal ini dilakukan wawancara secara langsung. Hasil wawancara yang dapat menggali jawaban/respon responden secara

lebih detail, jauh dan mendalam akan sangat bermanfaat untuk keperluan analisa. Pengisian daftar pertanyaan kuisisioner, responden diberikan kebebasan memilih sesuai pengamatannya.

Dalam melakukan wawancara, peneliti bertindak sebagai pengamat murni, yaitu mengamati proses sosial tanpa menjadi bagian dari proses tersebut, meski tetap menjalin hubungan baik, sehingga tidak mempengaruhi proses sosial yang terjadi.

### **3.1. Metode Penelitian, Lokasi Penelitian dan Pengambilan Sampel**

Penelitian dilakukan dengan metode *studi kasus* yaitu kawasan Pantai Matahari Terbit Sanur sebagai tempat kunjungan pariwisata yang fungsi pelestarian lingkungan masih baik dan dikelola desa adat. Pantai Matahari Terbit berlokasi di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan Pantai Matahari Terbit merupakan pantai yang pertama kali memiliki otonomi dengan memberdayakan desa adat Sanur sebagai pengelolaannya serta didukung dengan pernyataan tertulis dari pemerintah Kota Denpasar dan pemerintah Propinsi Bali, karena sebagian tanah di lokasi ini milik negara (khususnya lokasi hutan bakau).

Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari bulan Mei sampai dengan Juli 2002. Pengambilan sampel dari 8 (delapan) *Banjar* (Dusun) adat yang dilaksanakan secara bertahap dan proposional berdasarkan prosentase jumlah kepala keluarga dari tiap-tiap *Banjar* adat. Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari masyarakat desa adat, tokoh masyarakat, wisatawan /sopir travel. Data yang direkam dengan menggunakan

kuisisioner (daftar pertanyaan) yang telah disiapkan, kemudian diedarkan sebanyak 5 % dari jumlah anggota populasi. (Singarimbun dan Effendi. 1986 : 106). Jumlah responden 45 orang dengan komposisi tiap *Banjar* diambil 5 % dari jumlah kepala keluarga, sehingga total responden dari 8 *Banjar* adalah 37 orang. Tokoh masyarakat 3 orang, wisatawan/sopir travel 5 orang. Skala yang dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala ordinal atau LIKERT, yaitu skala yang berisi lima tingkat jawaban. (Imam Ghazali 2001: 128). Data sekunder dihimpun dari Desa Adat, Desa Dinas dan Instansi yang terkait dengan masalah penelitian, hasil telaahan pustaka serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Secara keseluruhan pengumpulan data menggunakan teknik *Triangulasi*, yaitu suatu prosedur yang menggunakan lebih dari satu metode secara independen, sehingga informasi dan data yang diperoleh dapat saling melengkapi (Hadi, 1997: 83). Metode tersebut antara lain : kuisisioner, wawancara, observasi dan studi kepustakaan atau data sekunder. Secara rinci teknik pengumpulan data untuk masing-masing komponen penelitian disajikan pada tabel 3.1. berikut :

**Tabel 3.1. Teknik Pengumpulan Data Untuk Masing-Masing Variabel**

No.	Variabel	Indikator	Teknik Pengumpulan Data			
			K	W	O	S
1.	Pemberdayaan	Partisipasi masyarakat, mulai dari ide, perencanaan, pengawasan dan pengelolaan.	✓	✓	-	✓
2.	Fungsi Lingkungan	- Pembangunan sarana dan prasarana - Kondisi fisik bangunan - Kondisi lingkungan	✓	-	✓	✓
3.	Kunjungan wisatawan	- Jumlah kunjungan wisatawan	-	✓	✓	✓

Keterangan :

K = Kuisisioner                      O = Observasi  
W = Wawancara                      S = Studi Pustaka

### 3.2. Penelitian kepustakaan

Tahapan ini berupa pengumpulan data-data pustaka, meliputi :

- metodologi penelitian baik metode kualitatif maupun metode kuantitatif
- Pembangunan berkelanjutan
- Pemberdayaan masyarakat
- Peran serta masyarakat
- Desa Adat
- Pariwisata

### 3.3. Penelitian lapangan/pengumpulan data

Dalam penelitian lapangan, peneliti melakukan kegiatan di lapangan/obyek penelitian untuk mengumpulkan data-data baik data primer maupun data sekunder. Proses perolehan data primer dilakukan dengan wawancara terstruktur dan semi terbuka dengan substansi pertanyaan yang telah disesuaikan dengan teori dan variabel yang akan diukur dan yang diambil. Namun diusahakan wawancara berjalan secara alami, sehingga diperoleh jawaban yang obyektif dan tidak dipaksakan. Dari responden inilah diperoleh data-data sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dalam variabel bebas dan terikat meliputi :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan yang dilakukan disini adalah observasi partisipatif. Yang dimaksud adalah proses observasi dimana peneliti ingin keluar dari dinding batas serta menghilangkan jarak antara obyek yang diamati dengan subyek (pengamat). Pengamatan diarahkan pada kegiatan mengamati secara akurat, mempertimbangkan adanya hubungan antara aspek-aspek yang terkait, baik secara fisik lingkungannya maupun masyarakatnya yang nantinya akan menjadi responden. Dalam observasi ini peneliti akan mencatat hasil pengamatannya secara deskriptif dan mendetail mengenai kejadian di lapangan. Juga data yang dapat diambil melalui rekaman kamera/foto maupun gambar sketsa.

## 2. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara merupakan salah satu upaya pencarian data dari responden secara langsung. Cara ini untuk memperoleh informasi tentang kondisi, perasaan, motivasi dan persepsi serta bermaksud melakukan eksplorasi terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam usaha mencari data, peneliti perlu menjalin hubungan baik (*rapport*) dengan masyarakat sasaran sebagai responden sekaligus harus menjaga obyektivitas data. Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu bersifat mengarahkan pada aspek tertentu namun dengan sistem terbuka (*open ended*) dimana dengan pertanyaan tersebut responden dapat menjawab secara bebas/leluasa. Selain dengan masyarakat sasaran, wawancara juga dilakukan pada pihak-pihak yang berkompeten dalam proses perencanaan untuk memperoleh sebagai alat *cross check*. Kemudian mengenai jenis-jenis pertanyaan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang sesuai dengan variabel-variabel terukur.

3. Pengumpulan data dari lembaga-lembaga formal maupun non formal.
4. Pengambilan gambar-gambar melalui sketsa dan foto-foto.

### 3.4. Metode Analisis

Analisa data menggunakan deskriptif untuk data yang bersifat kualitatif dan analisa statistik non parametrik dengan uji data dua sampel berhubungan/dependen (uji peringkat bertanda *Wilcoxon*) untuk data yang bersifat kuantitatif (Singgih Santoso. 2001: 401 dan Sudjana 1996: 450). Secara rinci metode analisa tersebut disajikan pada tabel 3.2. berikut :

**Tabel 3.2. Metode Analisis Aspek Pemberdayaan, Lingkungan dan Kunjungan Wisatawan**

No.	Variabel	Indikator	Metode Analisis Data
1.	Pemberdayaan	Partisipasi masyarakat, mulai dari ide, perencanaan, pengawasan dan pengelolaan.	Deskriptif
2.	Kunjungan wisatawan	- Jumlah kunjungan wisatawan	Model matematis
3.	Fungsi Lingkungan	- Pembangunan sarana dan prasarana - Kondisi fisik bangunan - Kondisi lingkungan	Uji peringkat bertanda <i>Wilcoxon</i>

### 3.5. Tahap Penyimpulan/Pelaporan

Tahap penyimpulan merupakan tahap yang menentukan yaitu sebagai upaya untuk menyimpulkan dan menginterpretasikan analisis data secara benar dengan metodologi yang digunakan, sehingga dapat mencapai hasil seperti tujuan yang diinginkan.

### 3.6. Definisi Konsep

1. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan masyarakat serta rasa memiliki tentang pengelolaan kelestarian dan fungsi lingkungan hidup (Wahyono Ary dkk 2001:10 dan Ginandjar kartasasmita 1996:141).
2. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses dalam melestarikan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, keterlibatan dan menyumbangkan masukan, baik tenaga, uang maupun material hingga keterlibatan memanfaatkan hasil-hasilnya (Koesnadi Harjasoemantri 1986: 49-57).
3. Pelestarian lingkungan adalah rangkaian upaya-upaya untuk memelihara /melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat/komponen lain yang dibuang ke dalamnya (Otto Soemarwoto 2001: 10).
4. Tradisi budaya adalah perilaku manusia (masyarakat) dalam keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya sebagai wujud aktivitas dalam melestarikan lingkungan (Mantra 1992: 45).

### 3.7. Definisi Operasional

1. Proses pemberdayaan, indikator yang dapat diukur meliputi tingkat partisipasi keterlibatan masyarakat mulai dari ide, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan berkelanjutan Pantai Matahari Terbit.

2. Lingkungan, indikator yang dapat diukur meliputi pembangunan sarana dan prasarana, kondisi fisik bangunan dan kondisi lingkungan.
3. Perubahan kunjungan pariwisata, indikator yang dapat diukur meliputi jumlah kunjungan wisata sebelum perbaikan penataan Pantai Matahari Terbit dengan jumlah kunjungan wisata setelah perbaikan penataan Pantai Matahari Terbit.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN DAN SEKITARNYA

Dari sekian banyak kawasan pantai yang terkenal yang ada di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Kawasan Pantai Sanur Denpasar Bali. Demikian pentingnya pantai bagi masyarakat Bali selain untuk menunjang kegiatan pariwisata juga untuk kepentingan kegiatan keagamaan seperti upacara *melasti* kelaut (upacara adat).

Perda Propinsi Dati I Bali No. 4 tahun 1999 tentang perubahan pertama Perda Propinsi Dati I Bali No. 4 tahun 1996 tentang rencana tata ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, diantaranya merevisi 21 kawasan pariwisata menjadi 15 kawasan pariwisata (detail bisa dilihat pada lampiran L.1) dan Sanur masih ditetapkan sebagai kawasan pariwisata. Ini dilakukan akibat pertimbangan pemikiran sejalan dengan aspirasi masyarakat yang mengacu kepada potensi daya dukung yang meliputi luas lahan dan volume air yang tersedia serta terciptanya lingkungan alam dan budaya yang lestari.

Perda Kotamadya No. 11 tahun 1994 tentang rencana tata ruang wilayah Koatamadya Denpasar, kawasan pariwisata Sanur dipertegas lagi. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Sanur 1996–2006 yang disusun oleh pemerintah daerah Kotamadya Denpasar pada tahun anggaran 1995/1996.

Pengembangan kawasan PMT juga sejalan dengan kebijakan RDTR kawasan Sanur. Adapun arah kebijakan pengembangan yang telah dirumuskan meliputi :

- Pengembangan permukiman
- Pengembangan pariwisata terutama wisata tirta
- Pengembangan budaya setempat dan kawasan suci
- Penerapan sempadan pantai 50 meter dari garis pasang tertinggi

Pada tahun 1998 oleh Departemen Pekerjaan Umum dibuat Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk pantai Sanur. Kemudian tahun 2000 Bali *Urban Infrastruktur Program* (BUIP) membuat rencana pengembangan kawasan strategis Sanur. Kawasan strategis Sanur merupakan bagian kota Denpasar yang mempunyai potensi untuk berkembang secara pesat. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan pariwisata yang sangat potensial di kawasan tersebut. Perkembangan kegiatan pariwisata tersebut saat ini telah membentuk kawasan tadi menjadi kawasan perhotelan yang implikasinya akan disertai oleh pembangunan lainnya seperti rumah, baik rumah tinggal maupun rumah sewa, perdagangan baik skala ekspor maupun kios dan pedagang acung, perkantoran jasa, restoran dan sebagainya.

Dengan adanya kegiatan pembangunan skala besar di kawasan ini, maka di tahun-tahun mendatang mungkin saja kawasan strategis Sanur akan mengalami penurunan kualitas lingkungan. Pembangunan baru yang terjadi di kawasan ini terjadi secara parsial dan mengisi petak-petak lahan yang ada tanpa memperhatikan kesatuan struktur tata ruang kawasan secara keseluruhan maupun lingkungan. Akibatnya terjadi ketidak serasian antara bangunan yang satu dengan yang lain dan

hal ini dapat menyebabkan buruknya lingkungan visual kedua kawasan ini. Masalah tersebut diatas tentunya tidak dapat dibiarkan berlangsung terus karena akan menambah parah kondisi lingkungan kawasan seperti :

- Masalah penyediaan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman
- Masalah estetika dan visual lainnya
- Masalah lalu-lintas dan kurangnya ruang parkir
- Masalah kurangnya ruang terbuka hijau/taman
- Masalah ketidak terpaduan penyediaan utilitas dan fasilitas umum
- Masalah daya dukung lingkungan kawasan

#### **4.1. Letak Geografis, Kependudukan, pendidikan dan kesempatan kerja**

Dikaitkan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa Sanur Kaja adalah salah satu hasil pemekaran dari desa Sanur lama, yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) yaitu: desa Sanur Kaja, desa Sanur Kauh dan Kelurahan Sanur. Pemekaran ini dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor: 57 Tahun 1982 tentang penetapan desa persiapan menjadi desa Sanur Kaja definitif. Memiliki wilayah daratan dengan luas seluruhnya 269 Ha, terletak disebelah Timur Laut, antara 08°35'31-08°44'49 Lintang Selatan dan 115°10'23-115°16'27 Bujur Timur.

Pada tahun 2000 jumlah penduduk di desa Sanur Kaja sebanyak 7.036 jiwa, terdiri dari 3.609 jiwa penduduk laki-laki dan 3.449 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) 1.430. Sedangkan desa adat Sanur mempunyai jumlah penduduk menurut kepala keluarga sebanyak 720 KK.

Tingkat pendidikan penduduk sudah tergolong tinggi. Hal ini dicerminkan dari banyaknya anggota masyarakat yang sudah menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi/akademi, dan rendahnya penduduk yang buta aksara.

Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha penduduk di desa Sanur Kaja pada umumnya tersebar pada sektor perdagangan, pertanian, perikanan (terutama perikanan laut), peternakan dan jasa lainnya. Kesempatan kerja pada sektor perdagangan dan jasa lainnya menduduki posisi yang paling dominan, disusul oleh kesempatan kerja sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta. Pertukangan (tukang batu dan kayu), buruh dan penjahit, merupakan kesempatan kerja yang banyak ditekuni oleh penduduk.

#### **4.2. Kegiatan pariwisata di sekitarnya yang mempengaruhi pantai Sanur**

- Kawasan pariwisata Nusa Dua merupakan kawasan pariwisata yang cukup terkenal di dunia, di mana tersedia berbagai jenis fasilitas, termasuk hotel berbintang. Walaupun kawasan ini tidak secara langsung menggunakan kawasan perairan Teluk Benoa, namun penanganan limbah cair yang menggunakan sistem lagun yang berlokasi di sekitar Teluk Benoa, sangat berpotensi mencemari perairan apabila penanganan dan pengawasannya tidak dilakukan secara cermat.
- Pulau Serangan, kegiatan ini akan mengembangkan Pulau Serangan dari 111 Ha menjadi sekitar 449 Ha. Reklamasi pantai telah dilakukan, selanjutnya akan dibangun kawasan pariwisata berupa hotel berbintang, lapangan golf, wisata bahari. Kegiatan ini dapat mengubah bentang perairan di sekitar Pulau Serangan

yang selanjutnya akan mengubah bentang perairan di Teluk Benoa, mengubah pola dan kekuatan arus, yang pada akhirnya akan memberi dampak pantai Sanur.

- Pembangunan *Estuary Dam* pada muara tukad Badung untuk dimanfaatkan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), akan mengurangi aliran air tawar ke laut, juga menurunkan kekuatan hutan bakau di sekitarnya.
- Rencana pengembangan Bandara Ngurah Rai akan mengarah ke lokasi taman hutan raya dan perairan Teluk Benoa (ke arah barat 500 meter dan 1.000 meter ke arah timur). Pengambilan wilayah perairan ini akan membawa dampak tertentu pada pola dan kekuatan arus yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pantai Sanur.
- Proyek pengembangan saluran air limbah Denpasar, merupakan proyek skala besar mengingat banyak limbah domestik yang dihasilkan oleh 700.000 penduduk maupun oleh lebih dari 3 juta wisatawan yang berkunjung ke Denpasar. Limbah yang telah diolah akan dibuang ke pelabuhan Benoa dan mengakibatkan pelabuhan Benoa tidak mampu menampung limbah tersebut, sehingga menyebarkannya ke terumbu karang Sanur, yang menyebabkan kerusakan besar karena pertumbuhan *algae* yang berlebihan dan dapat merusak struktur terumbu yang menghasilkan pasir putih bagi pantai-pantai di sekitarnya.
- Rencana Pengembangan taman hutan raya di Teluk Benoa, akan memanfaatkan kawasan hutan bakau. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan pengamanan pantai Sanur.

### 4.3. Perspektif kawasan Sanur

Kawasan pariwisata Sanur ditetapkan dengan Perda Propinsi Tk.I Bali No. 4 Tahun 1999 tanggal 12 April 1999, dengan kriteria: keindahan alam panorama, masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi, bangunan yang bernilai budaya/bernilai sejarah, sarana dan prasarana yang menarik wisatawan, luas lahan yang dapat dibangun sarana dan prasarana mengacu kepada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kawasan.

Kawasan pariwisata Sanur merupakan salah satu aset yang sangat potensi bagi sektor kepariwisataan di Kota Denpasar. Kebijakan melestarikan potensi kepariwisataan di kawasan ini merupakan upaya penting dalam mempertahankan perkembangan kawasan itu sendiri. Dengan demikian konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan konsep penting yang menjadi dasar pengembangan kawasan pariwisata Sanur. Potensi obyek wisata yang ada di kawasan pariwisata sangat mendukung perkembangan kegiatan usaha pariwisata Sanur, seperti wisata tirta, wisata pantai, cagar budaya, museum *Le Mayeur*, dan taman rekreasi penyu dewata.

### 4.4. Pelestarian (*heritage*) bangunan bersejarah di Sanur

Pelestarian bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah maupun bangunan dengan nilai arsitektur sangat diperlukan sebagai bukti konkrit maupun saksi sejarah yang tidak dapat dinilai harganya. Di samping itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di sekitarnya, membuat tempat tersebut

semakin menarik baik untuk rekreasi edukatif maupun bagi sektor jasa pariwisata dan perdagangan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

- Kawasan strategis Sanur memiliki potensi peninggalan bangunan-bangunan dengan nilai arsitektur dan nilai sejarah.
- *Grand Bali Beach Hotel* yang merupakan “*landmark*” Sanur memiliki nilai arsitektur dan nilai sejarah tersendiri karena merupakan satu-satunya bangunan berlantai 10 (sepuluh) di Bali dan merupakan bangunan dari pampasan perang.
- Beberapa pura seperti pura Sakenan yang mempunyai hierarki *Sad Kahyangan* di pulau Serangan, pura dalem Sanur, serta pura-pura lainnya dan bangunan banjar Semawang, memiliki nilai arsitektur yang dapat ditonjolkan dalam kawasan strategis Sanur.
- Selain memiliki nilai arsitektur, pura Sakenan juga memiliki nilai historis sebagai pura *Dhang Kahyangan*.
- Demikian pula pura Blanjong dimana terdapat prasasti Blanjong.
- Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus terhadap bangunan-bangunan bersejarah dan bernilai arsitektur, serta menyelaraskan pembangunan baru dengan lingkungan existingnya baik menyangkut tampak maupun ukuran bangunannya.

#### **4.5. Perspektif kawasan Pantai Matahari Terbit (PMT)**

Kawasan PMT seluas 0,94 hektar atau 9.400 m<sup>2</sup> terletak di wilayah desa adat Sanur dan termasuk dalam wilayah administratif Desa Sanur Kaja, Kota Denpasar. PMT dibatasi oleh jalan Pasir Ukir, di sebelah selatan merupakan tanah milik

perorangan, sedangkan di sebelah utara dibatasi oleh muara rawa bakau yang ada di kawasan PMT. Kawasan PMT terletak strategis di timur kota Denpasar, mudah dicapai oleh kendaraan umum baik dari lalu lintas regional maupun kota.

Kawasan PMT adalah lahan pantai strategis terakhir yang tersedia di Sanur dan belum tersentuh oleh investor swasta dan merupakan bagian dari kawasan Sanur. Untuk tetap mempertahankan keberadaan PMT sebagai pantai rakyat, Desa Adat Sanur mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk dapat mengelolanya dengan tujuan meningkatkan ketahanan rakyat. Aspirasi pengelolaan kawasan PMT didasari keinginan memberdayakan desa adat yang adaptif yang diharapkan menjadi akar pembangunan Bali bertumpu pada konsep *Tri Hita Karana*.

Penataan kawasan PMT di Sanur mendapat restu hak pengelolaannya dari Gubernur pada tanggal 15 Oktober 1998 setelah *Prajuru*/pengurus Desa Adat dan Desa Dinas Sanur Kaja membuat penulisan tentang pengelolaan wilayah PMT pada Gubernur. Legalitas rencana tersebut diperkuat dengan persetujuan dari Walikota KDH Tk.II Denpasar pada tanggal 21 Juni 1999 tentang penataan kawasan PMT di Sanur setelah menerima proposal dari Desa Adat Sanur tertanggal 5 April 1999.

Sejalan dengan arahan tercantum dalam surat Gubernur dan Walikota Denpasar maka karakter penataan dan pengelolaan PMT adalah sebagai berikut :

- Pemanfaatan ruang terdiri atas empat zona *suci* (pembakaran mayat dan *melasti*), zona rekreasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, zona kegiatan nelayan dan zona pelestarian hutan bakau.
- Program pembangunan dilaksanakan dalam tiga tahun anggaran.

- Perkiraan biaya pembangunan sekitar Rp. 1,7 milyar diharapkan dari berbagai sumber dana pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan dana pinjaman Bank Dunia.
- Karena kedudukan strategis PMT sebagai kawasan *suci kahyangan* tiga dan rekreasi, manfaat proyek PMT tidak saja dirasakan oleh masyarakat desa adat Sanur, namun juga jauh menjangkau penduduk Denpasar dan Bali Selatan.
- Badan usaha milik desa adat (BUMDA) Sanur dibentuk untuk bertindak sebagai unit implementasi dan pengelola PMT.

Untuk dapat merealisasikan rencana dan program PMT tersebut diperlukan bantuan dari berbagai pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat pada umumnya baik yang bersifat nasehat kepakaran (*advocacy*), bantuan teknis konsultasi dan bantuan pendanaan. Desa adat Sanur telah menyatakan komitmen yang penuh untuk tercapainya tujuan-tujuan pembangunan PMT.

#### 4.6. Pola pendanaan kawasan PMT

Dalam pengembangan kawasan PMT, dimana pengembangan dan pengelolaan dilakukan melalui suatu wadah Desa Adat, dalam pengelolaan dananya dilakukan pola sebagai berikut:

- Menerima gabungan pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan jangka bergulir, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- Sumber dana diperjuangkan bersama dari Pemerintah Kota Denpasar, Pemda Propinsi Bali, Departemen, gabungan partisipasi masyarakat khusus yang menerima *benefit* (dengan cara gotong royong), mungkin dari donasi donor, atau

jika menguntungkan warga ekonomi lemah/lingkungan dan mungkin juga pihak swasta.

- Pola pendanaan disesuaikan juga dengan siapa yang berkepentingan.
- Subsidi silang, dengan pengadaan berbagai bentuk usaha komunitas Desa Adat.

#### **4.7. Pemeliharaan pantai oleh Proyek Pengamanan Pantai Bali**

Kegiatan pemeliharaan pantai yang meliputi kegiatan pemeliharaan *groin* (tanggul pemecah gelombang) dan estetika *groin* memberikan dampak positif terhadap estetika lingkungan, yang selanjutnya akan mendukung kegiatan pariwisata pantai Sanur, akan berlangsung terus menerus dan dapat dinikmati oleh semua orang yang memanfaatkan. Lingkungan pantai yang nyaman, tertata dan terpelihara dengan baik, dengan sendirinya akan mengundang banyak wisatawan untuk berkunjung.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan di desa adat Sanur, maka data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan kualitatif dan kuantitatif. Analisa adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema ataupun katagori. Tanpa katagori ataupun klasifikasi data, maka akan terjadi *chaos*. Sedangkan tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau katagori, mencari pengaruh antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti, bukan kebenaran.

Di dalam menganalisis temuan-temuan di lapangan, tentu saja akan dikaitkan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan kawasan Pantai Matahari Terbit dalam kaitannya kunjungan wisatawan.

#### **5.1. Analisis pemberdayaan desa adat Sanur**

Dari hasil wawancara kepada tokoh masyarakat serta jawaban hasil kuisioner yang peneliti dapatkan terhadap 45 orang responden, setelah di analisis dari data yang diperoleh menyatakan pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan kawasan Pantai Matahari Terbit dalam kaitannya dengan kunjungan pariwisata, berhasil

dilaksanakan. Terbukti dari pertanyaan kuisisioner, apakah saudara senang ikut gotong royong ?. Ternyata semua responden menjawab ya. Kemudian kalau disuruh memilih, apakah lebih senang gotong royong atau membayar ?. Juga semua responden memilih gotong royong.

Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk sudah tergolong tinggi. Hal ini dicerminkan dari banyaknya anggota masyarakat yang sudah menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi/akademi dan rendahnya penduduk yang buta aksara. Tingkat pendapatan rata-rata per tahun per kapita di desa Sanur Kaja sebesar Rp.7.283.000,-. Angka ini menunjukkan jauh lebih tinggi dibandingkan angka per kapita Propinsi Bali. (sumber, potensi desa Sanur Kaja 1997). Keberhasilan pemberdayaan desa adat Sanur sangat dipengaruhi oleh pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan sumber daya pantai yang dimiliki. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki seperti bagaimana memanfaatkan lembaga kemasyarakatan yang telah ada, tujuan pengembangan dan proses sistem pemberdayaan, dapat dijelaskan di bawah ini.

#### **5.1.1. Lembaga Kemasyarakatan**

Hasil wawancara dengan Bendesa adat Sanur beserta staf dapat disimpulkan, yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat yang jarang mendapatkan perhatian sesuai dengan peranannya. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka suatu rencana yang baik tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu peranan masyarakat ini perlu mendapat perhatian dengan pembentukan arah secara

jelas sehingga bentuk partisipasinya dapat ditingkatkan. Kelembagaan masyarakat ini mempunyai berbagai bentuk seperti:

- *Banjar*, merupakan suatu kelompok sosial atau komunitas berdasarkan kesatuan wilayah atau desa, yang dikepalai oleh Kelian Banjar. Organisasi ini merupakan perkumpulan masyarakat yang mengatur hal-hal bersifat upacara keagamaan, adat istiadat serta masalah kemasyarakatan lainnya. Sebagai pusat aktivitas adalah bangunan yang disebut Bale Banjar. Bangunan yang mempunyai multi fungsi dengan fungsi utama sebagai tempat musyawarah anggota banjar, dengan demikian dapat dikatakan Banjar ini adalah penggerak dari aktivitas masyarakat.
- *Subak*, adalah organisasi petani di dalam pengaturan pengairan atau irigasi bagi kepentingan pertanian. Anggota dari organisasi Subak ini adalah para pemilik atau penggarap sawah yang menerima air irigasi dari bendung-bendung. Organisasi ini tidak hanya mengatur pembagian air yang adil, tetapi juga bagaimana meningkatkan produksi pertanian. Dengan demikian Subak merupakan media yang efektif bagi penyuluh pertanian untuk menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan tata cara pertanian yang baik.
- *Sekehe*, adalah suatu organisasi yang khusus bergerak dalam lapangan hidup atau profesi seperti *Sekehe Jaring* (perkumpulan nelayan), *Sekehe Manyi* (perkumpulan menuai), *Sekehe Memula* (perkumpulan menanam), *Sekehe Teruna* (perkumpulan para pemuda) , dan *Sekehe Daha* (perkumpulan gadis-gadis). Sekehe ini fungsinya adalah menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan desa dan didirikan dengan waktu lama. Sekehe pada umumnya terlepas dari organisasi Banjar dan didirikan atas dasar kebutuhan.

Dalam kaitannya dengan adat istiadat, manusia dalam kehidupannya memerlukan wilayah sebagai tempat bermukim dan melakukan kegiatannya. Wilayah pemukiman ini umumnya berbentuk dalam satu satuan desa, yang terdiri dari desa administratif yang berkaitan dengan administrasi pemerintah dan desa adat yang diikat oleh *awig-awig*/peraturan adat yang sama serta memiliki satu kesatuan dengan *Kahyangan Tiga*.

*Prajuru* desa adat merupakan perangkat desa yang berfungsi untuk senantiasa menjaga kesucian dan keselarasan serta keserasian dalam desa adat dengan menjaga ketertiban, keamanan dan dalam arti yang dinamis bersama-sama segenap anggota masyarakat adatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Dalam melaksanakan tugasnya *prajuru* desa berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *awig-awig* dalam mengatur hubungan anggota masyarakat adat dalam keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa/*Sanghyang Widhi Wasa*, hubungan antara anggota masyarakat adat dengan sesamanya dan hubungan anggota masyarakat adat dengan wilayah dan lingkungan desanya. Struktur dan jumlah personalia *prajuru* terdapat banyak ragamnya. Secara umum jabatan-jabatan tersebut dikenal sebagai berikut:

- *Bendesa* adat atau kelian adat sebagai kepala desa adat
- *Petajuk* desa sebagai wakilnya
- *Penyarikan* sebagai juru tulis
- *Sinoman* atau kesinoman sebagai juru arah

- *Jero mangku*, mangku desa atau Jero Gede, untuk jabatan pimpinan pelaksanaan upacara di *Pura Kahyangan* desa.
- *Pekaseh* atau *kelian subak* untuk jabatan urusan pengairan subak.

Dalam kaitannya dengan kegiatan masyarakat, yang dapat menjadi bentuk potensi yang mendorong dan memberikan kontribusi dalam pembangunan seperti :

- *Sangkep* (rapat), merupakan rembug banjar yang melibatkan seluruh warga banjar, membahas masalah-masalah yang terjadi dan program-program kerja. *Sangkep* ini sendiri dilaksanakan secara periodik dengan pokok bahasan yang berbeda.
- *Ngayah*, merupakan kegiatan gotong royong yang dilaksanakan di *Balai banjar* (ruang pertemuan), *Pura*, *Setra* (kuburan), atupun lingkungan banjar. Kegiatan ini juga dilakukan secara periodik biasanya dilakukan pada minggu pertama setiap bulan.
- Kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik yang dilaksanakan melalui wadah *sekehe-sekehe*.

Mengingat bahwa secara teritorial antar wilayah adat dan dinas sama, maka yang berperan adalah kelian dinas/kepala dusun untuk memimpin kegiatan-kegiatan tersebut, namun dalam pengumpulan masyarakat dan menengahi permasalahan yang timbul kelian adat ikut berperan, terutama antar masyarakat yang berbeda wilayah adatnya.

Sampai saat ini kegiatan sangat berperan sebagai penunjang kelancaran pembangunan di wilayah tersebut. Oleh karena itu perlu terus dibina dan diikutsertakan dalam proses pembangunan. Secara teritorial kelembagaan, antar

banjar/dusun dengan desa/kelurahan merupakan hubungan struktural, karena banjar/dusun merupakan bagian dari desa/kelurahan, namun dalam kenyataannya terkandung pula hubungan fungsional.

Dengan demikian, dalam lingkup desa, baik desa adat maupun desa dinas, akan terjadi kemungkinan-kemungkinan seperti halnya yang terjadi pada wilayah banjar adat dan dinas. Mengingat bahwa banjar adat dan desa adat terkait erat dengan budaya setempat dan tradisi setempat, maka akan bersifat tetap/tidak dapat berkembang sehingga dusun dinas dan desa dinas yang dapat dikembangkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan perkembangan kota/wilayah.

### **5.1.2. Tujuan Pengembangan PMT**

Dari buku laporan hasil perencanaan yang dibuat oleh masyarakat (*bottom up planning*) dan diperkuat hasil wawancara dengan Bendesa Adat serta tokoh masyarakat, dalam kerangka pengembangan kawasan Sanur, maka tujuan pengembangan kawasan PMT sebagaimana dirumuskan oleh *stakeholders* PMT adalah mewujudkan kawasan PMT sebagai kawasan multi fungsi untuk kepentingan rakyat dalam suatu tatanan kawasan suci. Secara spesifik tujuan yang hendak dicapai adalah :

- Mewujudkan kawasan suci yang berwawasan *Trihitakarana*.
- Meningkatkan budaya adat dan kegiatan keagamaan.
- Mewujudkan pengelolaan kawasan yang menunjang ekonomi rakyat.
- Revitalisasi Sanur sebagai kawasan tujuan wisata.
- Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.

- Memberdayakan kegiatan masyarakat dalam pengembangan kawasan.
- Melestarikan dan mengembangkan kegiatan nelayan.
- Meningkatkan prasarana dan sarana serta *public services* (pelayanan umum).

### **Visi dan Misi Pengembangan PMT**

Visi pengembangan PMT yang telah dirumuskan adalah mewujudkan kawasan PMT yang berfungsi sebagai kawasan suci dan kawasan rekreasi bagi masyarakat Bali Selatan.

Misi pengembangan PMT yang telah dirumuskan:

- Melestarikan ekosistem lingkungan pantai Sanur secara berkelanjutan.
- Memantapkan kedudukan pantai rakyat (*public beach*).
- Melestarikan kawasan suci untuk kegiatan keagamaan dan budaya.

### **5.1.3. Proses pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan PMT**

Berdasarkan catatan dokumen surat-surat di kantor desa adat Sanur dan informasi dari tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan PMT, dapat disusun usaha yang telah dilaksanakan mulai dari ide awal sampai pengelolaan. Sejalan dengan paradigma baru pembangunan yang menekankan pada demokratisasi perencanaan pembangunan dan perwujudan masyarakat madani, maka pendekatan pembangunan yang dilaksanakan di PMT adalah *community based approach*. Penyusunan perencanaan dilakukan melalui konsultasi dan kolaborasi desa adat Sanur dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pakar akademis, profesional, budayawan, asosiasi, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan berbagai kelompok masyarakat seperti kelompok masyarakat nelayan.

Pada tanggal 19 Desember 1997, Bendesa adat Sanur, *Pedanda Kaleran* dan bersama tokoh-tokoh masyarakat Sanur serta mendapat dukungan masyarakat adat Sanur, mengajukan prakarsa untuk penataan dan pengelolaan kawasan PMT yang lebih baik untuk melayani perkembangan kebutuhan pelayanan keagamaan dan rekreasi.

Pada bulan Mei 1998, konsep perencanaan awal dirumuskan oleh Bendesa adat Sanur bersama-sama beberapa tokoh masyarakat dan *Pedanda Kaleran* untuk menata kawasan PMT sebagai kawasan multi fungsi untuk kepentingan masyarakat dalam satu tatanan kawasan suci. Konsep perencanaan awal ini ditindak lanjuti dengan pengajuan surat kepada Gubernur Bali tanggal 6 Agustus 1998. Ada tiga hal penting yang disampaikan:

- Keinginan untuk mengelola/menata kawasan tanah negara di PMT sehingga menjadi kawasan pariwisata budaya terpadu.
- Keinginan untuk mengembangkan blok pembakaran jenazah, tempat upacara pemujaan sekah oleh *Pedanda*, kompleks bangunan *Balawista*, tempat parkir perahu, tempat upacara *melasti* dan upacara keagamaan lainnya seperti *mecaru*, *mewinten* (pembersihan) ke segara dan lain-lain.
- Mengajukan izin hak memakai/hak mengelola atas tanah negara pada kawasan PMT desa adat Sanur.

Tanggal 15 Oktober 1998 diperoleh jawaban dari Gubernur Propinsi Dati I Bali. Surat Gubernur memberikan penekanan pada hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan memberikan izin lokasi tanah-tanah yang berbatasan dengan pantai menunggu ditetapkan peraturan pemerintah.

- Semua pihak/masyarakat dapat memanfaatkan pantai untuk kepentingan pelaksanaan upacara keagamaan, adat istiadat, kepentingan pertahanan dan keamanan tanpa diberikan sesuatu hak/titel hak (terbatas hanya memanfaatkan).
- Mengharapkan agar desa adat dapat menjaga dan memelihara kelestarian tanah agar bermanfaat untuk kepentingan umum.

Pada tanggal 8 Desember 1998 dengan dibantu oleh Tim fasilitator Sanur, mempresentasikan konsepsi perencanaan awal kawasan PMT kepada Walikota Denpasar. Dan beliau pada dasarnya mendukung sepenuhnya prakarsa yang diambil oleh desa adat Sanur untuk mengembangkan PMT. Beberapa panduan yang disampaikan oleh Walikota:

- Penataan berasaskan falsafah *Trihitakarana*.
- Penataan sesuai dengan RTRW dan arsitektur tradisional Bali.
- Pemanfaatan PMT harus tetap terbuka bagi masyarakat luas.
- Penataan dilakukan oleh wadah perwakilan khusus desa adat secara partisipatif melibatkan semua kelompok masyarakat (*stakeholder*).
- Dilaksanakan secara professional.
- Perlu membentuk wadah khusus untuk mengelola PMT.
- Keuntungan ekonomi dari pengelolaan PMT dapat dipakai untuk pemberdayaan desa adat Sanur.
- Pelestarian lingkungan pantai tetap berkoordinasi dengan desa dinas dan Pemerintah Daerah.

- Mengutamakan swadaya dan swadana dan secara bertahap bantuan pembangunan prasarana dan sarana umum dari Pemerintah Daerah.

Bulan Nopember 1998, mendapat dukungan dari Tjentana (Yayasan Pembangunan Sanur), I.B.Ketut Oka (Bendesa adat Intaran) dan Gung Ruma Tenaya dalam pembentukan panitia khusus Proyek Pantai Matahari Terbit.

Tahun 1999 ditandai dengan diseminasi dan konsultasi dengan berbagai *stakeholders* (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi masyarakat) mendapatkan aspirasi, *needs*, masukan bagi penyempurnaan rencana PMT.

- Pada tanggal 6 Pebruari 1999, Bendesa adat, *Pedanda Kaleran* dan para *Klian Banjar* mengadakan konsultasi dengan Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Bali mengenai Pola Pengelolaan PMT sebagai Kawasan Suci dan Budaya.
- Tanggal 3 Maret 1999 dibicarakan perintisan pelaksanaan program padat karya yang *inovatif* dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP).
- Tanggal 12 Maret 1999, pembahasan/rembuk aspiratif mengenai pola penataan ruang dan pola pengelolaan awal PMT serta pembentukan Panitia dan Tim Kerja khusus PMT bersama Bendesa, *Pedanda Kaleran* dan *Kelian Banjar*. Konsultasi perencanaan partisipatif dengan berbagai tokoh desa adat (Bendesa, *Pedanda Kaleran*) *Kelian Banjar* dan Arsitek lokal dari desa adat.
- Tanggal 9 Juli 1999 penyelenggaraan diskusi dan konsultasi khusus kawasan PMT dengan pakar budaya dan pakar tata ruang serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

- Pada bulan Juli 1999, konsultasi dengan pihak Pusat Depdagri, Menperkim, Bappenas, Cipta Karya dan Bank Dunia.
- Tanggal 3 Agustus 1999 kawasan PMT ditunjuk sebagai proyek uji coba Yayasan Agro Kerakyatan.
- Pada tanggal 5 Agustus 1999 Bendesa desa adat Sanur melaksanakan konsultasi dengan *Sekeha* Nelayan Mina Sari Asih, tim pembangunan PMT dan konsultasi dengan pihak Hotel Alit yang berada di kawasan PMT..
- Tanggal 16 Agustus 1999 konsultasi dengan saudara Mangku, tokoh pemerhati lingkungan, khusus mengenai pengelolaan kawasan pantai dan penataan teknis bronjong/penahan erosi.
- Tanggal 16 Agustus 1999 konsultasi dengan pakar sosial, penataan ruang, Dinas Pariwisata Prop.Bali, perhotelan dan tokoh masyarakat. Diantaranya Manuaba, N.Gelebet, Nurjaya, Ketua Pengusaha Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Bali, DPRD dan Kesuma Wardana.
- Pada bulan Agustus 1999, pertemuan dilaksanakan untuk membahas surat tanggapan Walikota terhadap proposal desa adat Sanur dan sistem pengelolaan dengan badan usaha milik desa adat (BUMDA). Peserta rapat : desa adat Sanur, panitia pembangunan PMT dan tim fasilitator.
- Pada bulan September 1999 desa adat Sanur menjajaki kembali kemungkinan pelaksanaan program dengan pola Padat Karya untuk pembangunan kawasan PMT.

- Bulan September 1999 diadakan rapat lanjutan membahas surat Walikota yang ditujukan ke desa adat. Peserta rapat : desa adat Sanur, panitia pembangunan PMT dan tim fasilitator.
- Pada bulan Oktober 1999 dilaksanakan presentasi dan konsultasi masalah PMT serta kawasan Sanur umumnya dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Deputi Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), dimana pada dasarnya didapatkan dukungan penuh dari instansi pusat untuk pengembangan kawasan PMT.

#### **5.1.4. Manajemen pengelolaan PMT**

Hasil wawancara dengan Bendesa adat, staf pengelola BUMDA (badan usaha milik desa adat) dan tokoh masyarakat serta data sekunder yang diperoleh dari desa adat, maka manajemen pengelolaan Pantai Matahari Terbit termasuk dalam katagori baik. Kronologinya sebagai berikut : Penataan Pantai Matahari Terbit di Sanur mendapat restu hak pemanfaatan pengelolaan dari Gubernur Propinsi Bali pada tanggal 15 Oktober 1998, kemudian legilitas rencana tersebut diperkuat dengan persetujuan Walikota Denpasar pada tanggal 21 Juni 1999 tentang penataan kawasan PMT Sanur setelah menerima proposal Desa Adat Sanur tertanggal 5 April 1999. Desa Adat Sanur perlu membentuk semacam Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDA), dimana pengelolaannya dilaksanakan oleh Desa Adat sendiri yaitu merupakan upaya memperkuat posisi tawar terhadap investor terutama dalam pengembangan sebuah kawasan wisata. BUMDA berfungsi sebagai lembaga sektor riil yaitu: pasar, restoran dan lain-lain serta penyeimbang Lembaga

Perkreditan Desa (LPD). Antara BUMDA dan LPD harus ada kerjasama yang saling menunjang, sehingga dana masyarakat berputar lebih cepat di desa dan tidak lari ke kota atau ke pusat. Dengan demikian fungsi religius desa adat benar-benar berjalan.

Manajemen dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Azas Tri Hita Karana dalam keseimbangan antara Tuhan, manusia dan alam.
- Profesional, transparan dan azas kegotongroyongan.
- Bertumpu pada partisipasi masyarakat dan berwawasan sosial memberdayakan warga miskin.
- Kepedulian terhadap lingkungan hidup.
- Mekanisme kontrol seimbang (*balance control*).
- Organisasi manajemen dibentuk secara bertahap, terbuka (transparan) berdasarkan partisipasi masyarakat yang tumbuh secara dinamis sesuai dengan kebutuhan
- Pengelolaan berdasarkan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat senasib, seperti : wakil nelayan/perahu, truna truni, ibu-ibu, subak, pedagang kaki lima, LSM.
- Ketua Dewan pengelola yang pemilihannya diputar dan memegang jabatan yang terbatas.
- Pengelolaan dilakukan dalam suatu wadah Badan Pengelola (BP).
- Pengelolaan operasional dilakukan secara profesional oleh suatu Dewan Direksi yang dapat dicari secara terbuka yang direkrut/dipilih oleh Dewan sesuai

kemampuan, *ke-professionalism*, dan kepedulian sosialnya yang digaji sesuai kemampuan wadah.

- Adanya suatu *trust fund* untuk pembangunan fisik maupun peningkatan organisasi, keterampilan, sosial ekonomi dalam sarana peningkatan manajemen internal swadaya.
- Adanya dana pemampu mikro berputar (*enabling micro rotating funds*) yang digunakan untuk pemberdayaan desa adat secara berkesinambungan, pemberdayaan warga lokal ekonomi lemah dan pelestarian lingkungan Sanur.

Sebagai wujud nyata kontribusi desa adat Sanur kepada masyarakat dalam pengelolaan PMT berupa sumbangan (*dana punia*) pada saat hari raya upacara di pura (*piodalan*). Biasanya semua biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat dan akibat bantuan dana dari desa adat Sanur maka beban masyarakat menjadi lebih ringan.

#### **Susunan Personalia Badan Usaha Milik Desa Adat Sanur**

Pemegang saham	: Desa Adat Sanur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bendesa/Ketua Adat Sanur</li> <li>▪ Kelihan-kelihan/RW Banjar. Adat Sanur.</li> </ul>
Ketua	: Ida Bagus Udayana Putra, SE.MM
Sekretaris	: I Wayan Umbara
Bendahara	: Ida Bagus Raka Wisana, SH

#### **Perencanaan dan Pengembangan**

Ketua	: Drs. I Made Berana
Sekretaris	: Ida Bagus Surya Dharma

- Anggota : 1 Ida Bagus Paramarta  
2 Ida Bagus Nyoman Menuh  
3. Ida Bagus Anom Merta  
4. I Made Wisna  
5. Drs. Wayan Sarjana

Bagian Logistik : Ida Bagus Alit Paramatana

Bagian Pembukuan : I Made Damayana, SE

Bagian Pemasaran : I Gede Sudana, SE

Bagian Personalia : I Ketut Suryawan

#### **Unit-Unit Usaha**

##### **Lembaga Perkridikan Desa (LPD)**

Ketua : Ida Bagus Putu Gede

Sekretaris : Diarta, SAG

Bendahara : Wayan Loka

##### **Pantai Matahari Terbit**

Ketua : Ida Bagus Putra Suta

Sekretaris : Ida Ayu Sri Suryani, SE

Bendahara : Ir. I Wayan Yusmika

##### **Kelompok Nelayan**

Ketua : Ketut Diarka

Sekretaris : I Wayan Santra

Bendahara : I Made Sukada

**Badan Pekerja**

Penanggung jawab : Ida Bagus Anom Buana (Bendesa Adat Sanur).

Ketua : Drs. I Made Berana

Sekretaris : Ida Bagus Udayana Putra, SE.MM

Anggota :

- I Made Wisna
- Ida Bagus Putra Suta
- Ida Bagus Anom Wijaya
- Ida Bagus Putu Dirga
- Drs. I Wayan Sarjana

**5.1.5. Pengujian dengan teori perencanaan**

Menurut Hadi (2001: 26), kunci dari gagasan perencanaan transaktif dan pembelajaran sosial adalah evolusi dari desentralisasi yang membantu orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih, dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sistem pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan PMT lebih berorientasi pada pembangunan sosial dimana fokusnya pada kualitatif dan pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi, eksploitasi dan ada keseimbangan.

Untuk menguji dipakai 7 langkah-langkah perencanaan sosial yang disebut sebagai *the seven magic steps of planning* :

1. Merumuskan masalah

Dari perspektif masyarakat desa adat Sanur, PMT yang dimiliki oleh negara, kondisinya cukup memprihatinkan sehingga tidak menunjang aktifitas wisata di lingkungannya. Untuk itu desa adat Sanur sangat berkepentingan bisa mengelola.

## 2. Menetapkan tujuan

- Meningkatkan kegiatan religius dan budaya adat dalam keterpaduan pembangunan kesejahteraan masyarakat lokal secara terpadu.
- Pengelolaan kawasan secara multifungsi dengan pengadaan sarana ekonomi rakyat.
- Menghidupkan kembali (*revitalisasi*) daya tarik kepariwisataan nostalgia Sanur sebagai kawasan tujuan wisata khusus.
- Perencanaan dan penataan wilayah dan tanah secara terpadu disekitar kawasan PMT secara saling menguntungkan (*mutual benefit*).
- Melestarikan sumber daya lingkungan.
- Meningkatkan keberadaan/kegiatan nelayan, meningkatkan sarana dan prasarana rekreasi pantai sebagai *public service* (pelayanan umum).
- Mengimplementasikannya dalam suatu manajemen yang profesional dan diterima masyarakat.

## 3. Mengkaji fakta

Untuk mengkaji fakta, masyarakat menggunakan analisis kondisi dengan *strengths, weaknesses, opportunities dan threats/SWOT* :

- Kekuatan, keindahan alam, tingkat pendidikan masyarakat dan mempunyai wadah lembaga desa adat yang kuat serta *investor* swasta banyak yang melirik.

- Kelemahan, masyarakat desa adat Sanur tidak punya lahan /keterbatasan lahan.
- Peluang, memberdayakan desa adat dalam memperkuat pembangunan ekonomi rakyat (pasar senggol/kaget, *free market*) di Sanur berwawasan budaya kerakyatan dalam meningkatkan daya tarik wisata.
- Ancaman, sebelumnya sebagai tempat buang sampah dan buang lumpur tinja.

#### 4. Mencari alternatif solusi :

- Melestarikan potensi kepariwisataan di kawasan pantai Sanur merupakan upaya penting dalam mempertahankan perkembangan kawasan itu sendiri. Dengan demikian konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan konsep penting yang menjadi dasar pengembangan kawasan pariwisata Sanur.
- Proses yang melibatkan *stakeholders* di dalam perencanaan dan perancangan PMT dengan menggunakan *bottom up* dan *top down* secara bersamaan telah dipilih untuk membuat rencana penataan PMT karena berbagai kepentingan perlu dijembatani.
- Semua kegiatan berlandaskan pemberdayaan desa adat Sanur melalui gerakan swadaya masyarakat, serta diarahkan untuk mampu dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri serta berkelanjutan.

#### 5. Memilih alternatif terbaik :

Sebagai langkah awal dipilih proses yang melibatkan *stakeholders* di dalam perencanaan dan perancangan PMT dengan menggunakan *bottom up* dan *top*

*down* secara bersamaan karena berbagai kepentingan perlu dijembatani. Sedangkan prioritas yang lain mengikuti.

#### 6. Mengkaji alternatif.

- Perencanaan penataan PMT dituangkan dalam program pembangunan, kemudian di evaluasi pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat desa adat Sanur secara umum dan lebih khusus oleh tim pembangunan yang dibentuk masyarakat desa adat Sanur dan hasil evaluasi disampaikan dengan transparan.
- Peranan konsultan pembangunan disini menjadi penting untuk menampung gagasan-gagasan, merepresentasikan dalam media yang dimengerti semua pihak dan menjembatani komunikasi antar berbagai pihak. Media rencana yang dipilih dalam penataan kawasan PMT ini adalah dalam bentuk poster-poster yang mudah dipahami.

#### 7. Mengimplementasikan.

- Warga masyarakat desa adat Sanur didudukkan sebagai pelaku utama dalam pembangunan dan diberdayakan agar mampu menanggulangi segala permasalahan yang mereka hadapi secara berkelanjutan.
- Konsultan (Antonio Ismael) berfungsi sebagai fasilitator.

Kesimpulan *The seven magic steps of planning* sebagai alat uji telah diterapkan dalam pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan kawasan PMT menjadi lebih baik dan sangat signifikan.

## 5.2. Analisis Fungsi Lingkungan sebelum dan sesudah penataan PMT

Responden telah menjawab data pertanyaan kuesioner yang berhubungan satu sama lain, dalam hal ini mendapat pengukuran-pengukuran yang sama, yaitu diukur sebelum dan diukur sesudah. Skala yang dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala ordinal atau LIKERT. Untuk itu analisis menggunakan statistik non parametrik dengan menggunakan program SPSS (*Statistic Program for Social Science*). Keuntungan dari penggunaan metode non parametric (Singgih Santoso. 2001 : 379) adalah :

- Metode non parametrik tidak mengharuskan data berdistribusi normal, karena itu metode ini sering juga dinamakan uji distribusi bebas (*distribution free test*). Dengan demikian, metode ini dapat dipakai untuk segala distribusi data dan lebih luas penggunaannya.
- Metode non parametrik dapat dipakai untuk level data seperti nominal dan ordinal. Hal ini penting bagi para peneliti *social*, seperti penelitian perilaku konsumen, sikap manusia, yang mengalami kendala dengan hasil pengukuran yang tidak berlevel interval atau rasio.
- Metode non parametrik cenderung lebih sederhana dan mudah dimengerti daripada pengerjaan metode parametrik.

Di samping berbagai keunggulan di atas, metode non parametrik juga mempunyai beberapa kelemahan, seperti tidak adanya sistematika yang jelas seperti pada metode parametrik, hasilnya dapat meragukan karena kesederhanaan metodenya, serta tabel-tabel yang dipakai lebih bervariasi dibanding tabel-tabel standar pada metode parametrik. Apakah akan dipakai metode parametrik atau non

parametrik tergantung dari situasi yang ada, dan keduanya lebih bersifat saling melengkapi dalam melakukan berbagai pengambilan keputusan. SPSS menyediakan menu khusus untuk perhitungan statistik non parametrik. Aplikasi, dua sampel saling berhubungan (*two dependent samples*) dengan Test Non Parametrik uji peringkat bertanda Wilcoxon untuk mengetahui perbedaan kondisi kawasan PMT sebelum penataan dengan sesudah penataan.

Kasus di atas terdiri atas dua sampel yang berhubungan satu sama lain, karena subjek (dalam hal ini penataan Pantai Matahari Terbit) mendapat pengukuran-pengukuran yang sama dan tertutup, yaitu diukur sebelum penataan dan diukur sesudah penataan Pantai Matahari Terbit. Untuk menghitung digunakan uji non parametrik dengan dua sampel yang dependen. Hasil kuisioner yang telah dilakukan terhadap 45 orang responden, pendapat mereka adalah berbeda-beda terhadap pertanyaan kondisi sebelum penataan PMT dan pertanyaan perubahan yang terjadi karena penataan PMT. Dari hasil analisis dengan bantuan komputer SPSS versi 10 diperoleh hasil seperti pada lampiran L.9., L.10., L.11., L.12., dan L.13.

Dibawah ini rekapan hasil perhitungan/analisa statistik dengan *Wilcoxon Signed Ranks Test* dari variabel fungsi lingkungan dengan indikator pembangunan prasarana, kondisi lingkungan dan kondisi fisik bangunan sesuai lampiran L. 11., L.12., dan L.13.

**Tabel 5.1. Hasil Analisis Statistik Tanggapan Masyarakat Terhadap Tiga Variabel Fungsi Lingkungan.**

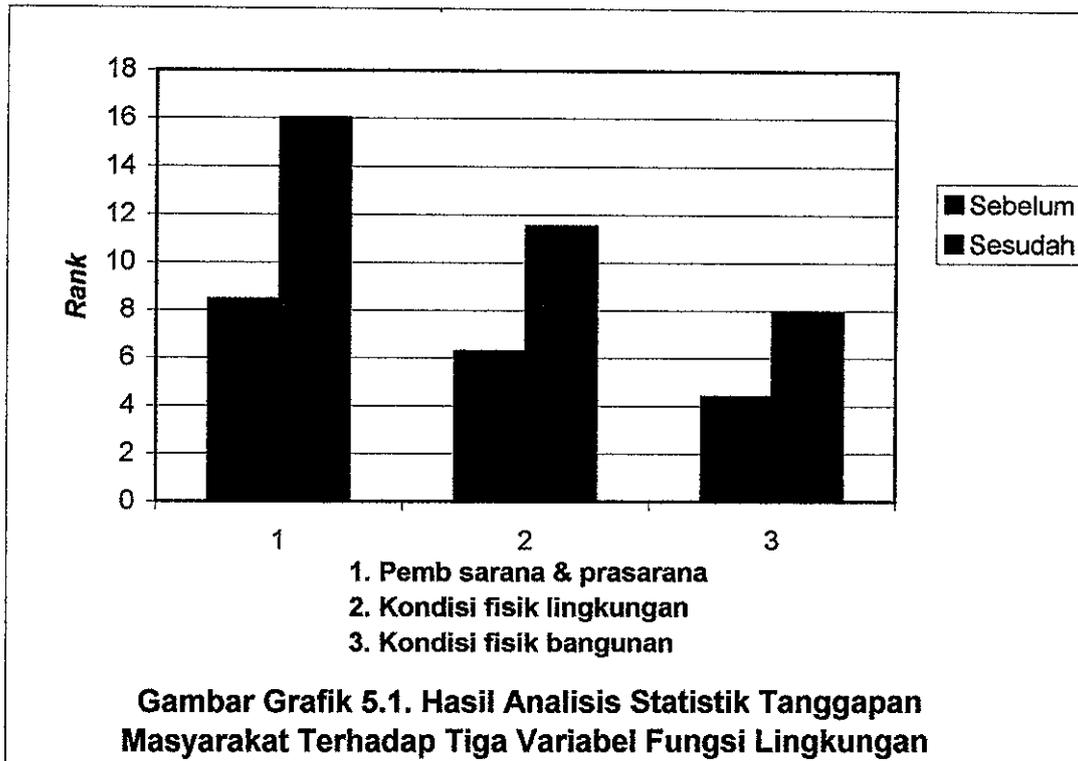
No.	Variabel Fungsi Lingkungan dengan Indikator		Mean	Std. Deviation	Min	Max	Asymp. Sig. (2-tailed) / Nilai Probabilitas
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Sebelum	8,44	2,211	5	16	0,000***
		Sesudah	16,00	2,440	9	20	
2.	Kondisi Lingkungan	Sebelum	6,27	1,176	4	9	0,000***
		Sesudah	11,51	1,926	6	15	
3.	Kondisi Fisik Bangunan	Sebelum	4,38	1,466	2	10	0,000***
		Sesudah	7,96	1,186	6	10	

Sumber : dari hasil analisis

Keterangan :

- \*<sup>)</sup> Berbeda nyata pada taraf 0,05
- \*\*<sup>)</sup> Berbeda sangat nyata pada taraf 0,01
- \*\*\*<sup>)</sup> Berbeda sangat-sangat nyata pada taraf 0,001

Sebagai ilustrasi tentang variabel fungsi lingkungan yang terdiri dari tiga indikator yaitu pembangunan sarana dan prasarana, kondisi lingkungan serta kondisi fisik bangunan. Sebelum penataan PMT dengan sesudah penataan PMT, terlihat jelas perbedaan hasil ke tiga analisis di dalam gambar grafik 5.1. menjadi lebih baik setelah diadakan penataan.



#### Keputusan :

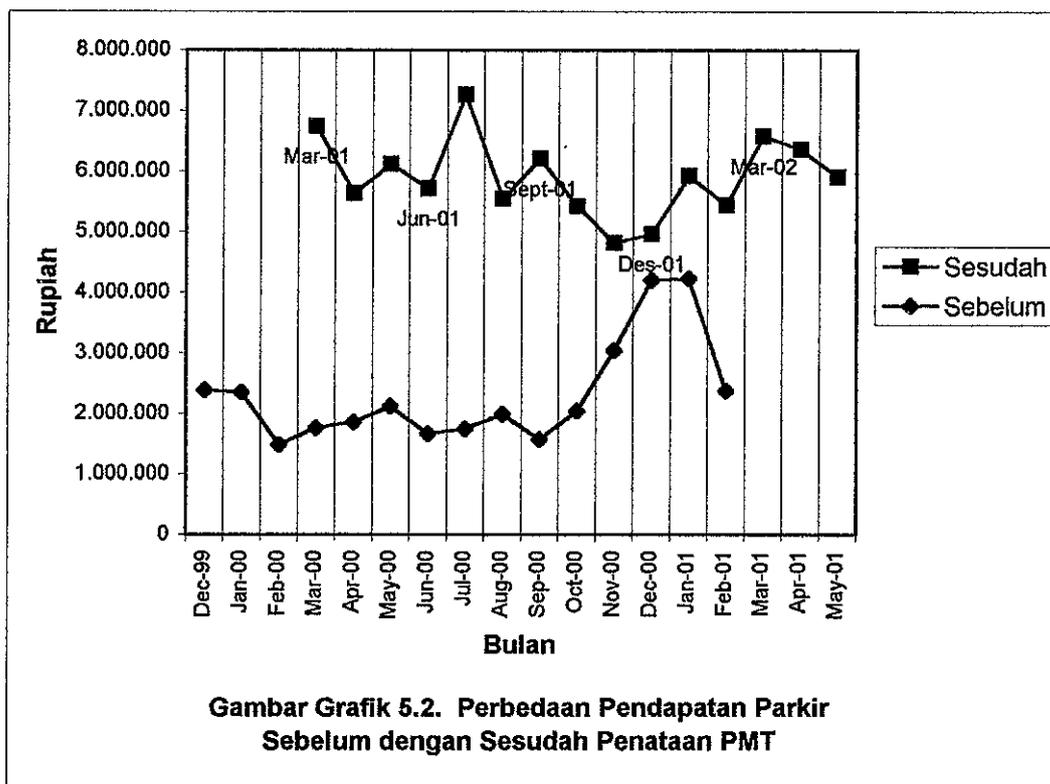
Dari hasil pengujian *Wilcoxon Signed Ranks Test statistics*, terdapat perbedaan yang sangat-sangat nyata ( $P < 0.001$ ) sebelum dilakukan penataan kawasan PMT dengan sesudah dilakukan penataan kawasan PMT

#### 5.3. Perbedaan kunjungan wisatawan sebelum dan sesudah penataan PMT

Kunjungan wisatawan ke PMT tidak dicatat oleh pengelola, namun berdasarkan pendapatan dari parkir setiap bulan bisa dihitung. Hasil wawancara dengan petugas parkir yang jumlah personil 6 (enam) orang dengan penugasan bergantian maka pengunjung yang menggunakan sepeda motor rata-rata berdua, sedangkan yang naik mobil rata-rata jumlah penumpang empat orang dan kunjungan wisatawan pejalan kaki tergantung hasil pendapatan parkir, yaitu jika jumlah setoran 6

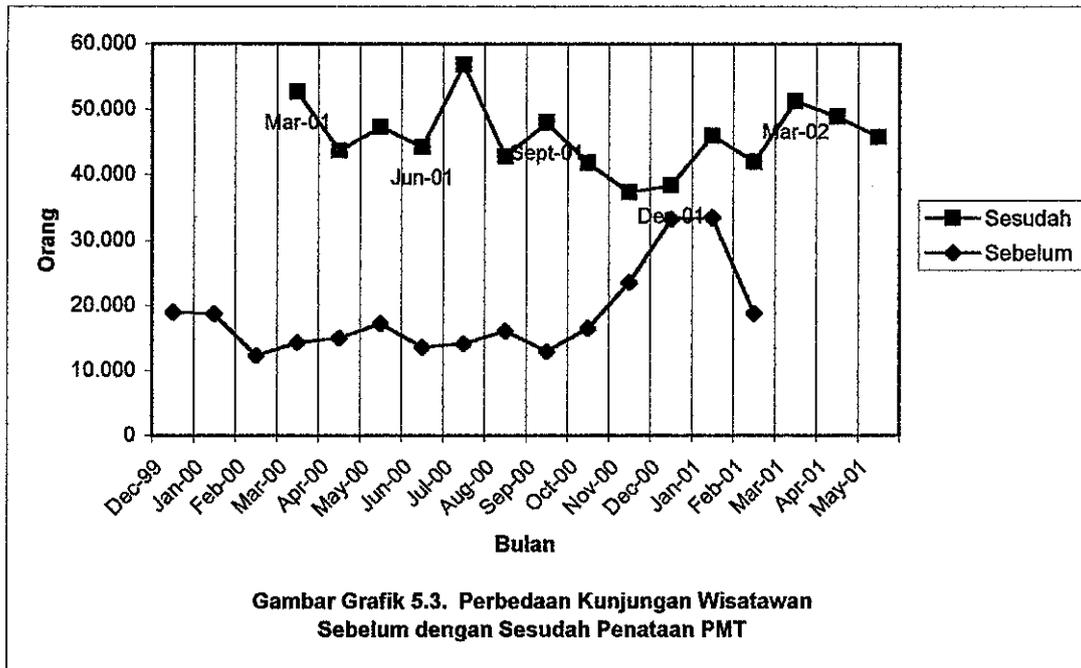
juta rupiah per-bulan, maka rata-rata kunjungan wisatawan pejalan kaki 150 orang per-hari. Data ini juga berdasarkan pengamatan/ observasi langsung di lapangan.

Perbedaan selama lima belas bulan mulai dari bulan Desember 1999 sampai dengan Pebruari 2001 kunjungan wisatawan sebelum dan sesudah penataan PMT setelah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDA) mulai bulan Maret 2001 sampai dengan Mei 2002, dapat dilihat hasil perhitungan secara matematis dalam lampiran tabel L.14, dimana rata-rata jumlah kunjungan wisatawan meningkat. Hasil perhitungan tersebut dituangkan dalam bentuk gambar Grafik. Di bawah ini memperlihatkan gambar grafik 5.2, dimana perbedaan pendapatan parkir sebelum dengan sesudah penataan PMT, dengan data pendapatan parkir setiap bulan diperoleh dari hasil laporan BUMDA. Menurut peneliti, terjadinya perbedaan yang mencolok pendapatan parkir sebelum penataan kawasan PMT dengan sesudah penataan kawasan PMT akibat manajemen pengelolaan yang salah pada saat lalu, masyarakat tidak terlibat langsung dan pengawasan lemah.



Sedangkan gambar grafik 5.3. perbedaan kunjungan wisatawan sebelum dengan sesudah penataan PMT, didapatkan dari hasil perhitungan pada lampiran tabel L.14. Data hasil perhitungan jumlah kunjungan wisatawan setelah dikonsultasikan dengan pihak pengelola BUMDA, ternyata sangat setuju dan data ini sangat diperlukan oleh desa adat Sanur sehingga data tersebut disahkan oleh Bendesa adat Sanur. Terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisata pada bulan Oktober, November, dan Desember 2001 (Lihat Grafik 5.3 dibawah ini) disebabkan adanya kegiatan proyek drainase dan trotoar pada lokasi kawasan PMT.

Dinas Pariwisata Kota Denpasar sudah pernah meminta data jumlah kunjungan wisatawan ke PMT, namun desa adat Sanur belum bisa memenuhi karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran/dana.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pada Bab Penutup, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dan selanjutnya diberikan rekomendasi. Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup tidak saja ditentukan oleh pemerintah, namun sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat telah ditegaskan dalam perundang-undangan di Indonesia, selain dalam GBHN 1999-2004, peran serta masyarakat diatur pula dalam undang-undang tentang lingkungan hidup yaitu U.U.No.4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (UULH), dan Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH), maupun dalam berbagai peraturan pelaksana lainnya.

Ketentuan tersebut menunjuk kepada mutlak perlunya peran serta setiap orang sebagai anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, apabila diinginkan program-program di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup berhasil dengan baik. Adalah kenyataan, hal-hal tersebut diatas belum dilaksanakan secara optimal. Pemberdayaan desa adat masih terbatas pada program kegiatan yang konvensional saja, sedangkan yang bernilai ekonomis tinggi walaupun berdampak luas dan penting, desa adat tidak diberdayakan.

## 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan panelitian maka dapat disimpulkan :

1. Pemberdayaan desa adat Sanur dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan kelembagaan masyarakat yang ada untuk menggerakkan, seperti: *Banjar* (RW), *Subak* (organisasi petani bidang perairan) dan *Sekehe* (perkumpulan). Keterlibatan masyarakat dari sejak awal yaitu mulai ide/gagasan, perencanaan, pelaksanaan , pengawasan, pemeliharaan dan di kelola secara profesional untuk berkelanjutan. Keefektipan/keberhasilan pemberdayaan desa adat Sanur diuji dengan *The seven magic steps of planning*, telah diterapkan dalam penataan kawasan PMT sehingga kondisinya menjadi lebih baik dan sangat signifikan.
2. Hasil pengujian variabel fungsi lingkungan dengan *Wilcoxon Signed Ranks Test statistics* terdapat perbedaan yang sangat-sangat nyata ( $P < 0,001$ ) sebelum dilakukan penataan kawasan PMT dengan sesudah dilakukan penataan kawasan PMT (lampiran L.11. L.12., dan L.13).
3. Selama lima belas bulan di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa Adat Sanur, kunjungan wisatawan ke PMT di uji dengan analisa model matematis (lampiran tabel L.14), jumlah kunjungan wisatawan sebelum penataan dengan sesudah dilakukan penataan PMT meningkat dan signifikan.
4. Dari pengujian terhadap ketiga variabel penelitian ini dapat disimpulkan, pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan kawasan PMT telah berhasil meningkatkan kualitas fungsi pelestarian lingkungan menjadi lebih baik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

## 6.2. Rekomendasi

Mengingat dasar pemikiran dan pentingnya peran serta masyarakat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka langkah awal yang perlu diupayakan adalah mengembangkan pengertian, penghayatan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup. Dengan kemajemukan masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, maka cara-cara menanamkan pengertian, penghayatan dan kesadaran tersebut harus berbeda-beda pula. Disamping itu guna mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat, seyogyanya dilakukan dengan cara proaktif dan dinamis, bukan dengan cara-cara pasif. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus berusaha secara optimal melakukan pendekatan dan menggalang peran serta masyarakat termasuk pemberdayaan desa adat dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam di tempat lain.

Untuk kawasan PMT yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan desa adat Sanur adalah :

1. Sumber daya manusia pengelola Badan Usaha Milik Desa Adat, perlu ditingkatkan dalam bentuk pelatihan/kursus tentang administrasi keuangan dan manajemen.
2. Kawasan Pariwisata Sanur merupakan satu-satunya kawasan andalan Kota Denpasar, untuk itu program yang telah dibuat bisa direalisasikan seperti candi bentar, lampu penerangan, pengaspalan lanjutan, tambahan bak sampah dan pos penjaga parkir.
3. Pantai Sanur sangat ramai dimanfaatkan untuk mandi oleh masyarakat Kota Denpasar, dengan demikian pemberdayaan desa adat Sanur secara terpadu dengan desa dinas dan pemerintah Kota Denpasar mengadakan pengawasan lebih

ketat pembuangan limbah hotel ke laut, pedagang kaki lima, dan *café* liar. Saluran drainase yang mengalir ke hutan bakau diduga ada limbah hotel yang belum diolah sehingga airnya bau, ikan mati dan mengancam kehidupan hutan bakau.

4. Keberhasilan pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan PMT bisa sebagai contoh untuk desa yang lain.
5. Pemerintah supaya mempublikasikan tentang keberhasilan pemberdayaan desa adat Sanur dalam penataan PMT sehingga bisa sebagai objek atau sasaran dari tempat study banding.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Rosyidi (2000). *Peran Penataan Ruang Dalam Pengembangan Wilayah dan Aspek Dasar Pertimbangan Dalam Penataan Ruang*. Bandung Homtel Indah, 5-6 September 2000. Makalah Pelatihan Penataan Ruang bagi anggota Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota Semarang.
- Anonimus. 1997. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Anonimus. 2001. *Peraturan Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 tentang Desa Adat*. Denpasar: Sekretariat Daerah Propinsi Bali.
- Budi Tjahjati (2000). *Desentralisasi dan Otonomi Penataan Ruang Sesuai Dengan UU.22 Tahun 1999*. Bandung Homtel Indah, 5-6 September 2000. Makalah Pelatihan Penataan Ruang bagi anggota Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota Semarang.
- Bruce Mitchell dkk. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- BJ Habibie dalam Dawan.M (1997). *Wawasan dan Visi Pembangunan Abad -21* Jakarta PT. Intermedia.
- Djarmiko, dkk (2000). *Pendayagunaan Industrial Waste Management (Kajian Hukum Lingkungan Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Daldjoeni. N. (1998). *Geografi Kota dan Desa*, Bandung, Penerbit PT.Alumni.
- Eri Barlian (2000). *Peran serta masyarakat petani dalam pengelolaan lingkungan taman nasional Kerinci Seblat*. Artikel lingkungan dan pembangunan
- Eko Budihardjo (1997). *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: Penerbit Alumni
- Gorda, I Gusti Ngurah (1999). *Manajemen dan Kepemimpinan Desa Adat di Propinsi Bali dalam Perspektif Era Globalisasi*. Denpasar: Widya Kriya Gematama.
- Ginandjar Kartasmita (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta, Penerbit PT. Pustaka CIDESINDO.
- Imam Ghozali (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Penerbit : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Koesnadi Harjasoemantri. (1986). *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat (1976). *Kebudayaan Mentalite dan Pembangunan*, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia.
- Mantra, Ida Bagus (1992). *Bali: Masalah Sosial, Budaya, Modernisasi*. Denpasar: Upada Sastra.
- Nyoman Suamba (2000). *Sapta Pesonai*. Denpasar. Diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pariwisata Seni Budaya Propinsi Bali.
- Nippon Koei Co,LTD and Asosiasi (1998). *Analisa Dampak Lingkungan Rencana Pengamanan Daerah Pantai Sanur*, Proyek Pengamanan Pantai Bali, Denpasar.
- Otto Soemarwoto (2001). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta. Djambatan.
- PT. Lenggogeni and Asosiasi (2000). *Pemaduserasian Perencanaan Tata Ruang dan Perancangan Kota*, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Jakarta.
- Perda Prop.Dati I Bali No. 4 tahun 1999. *Rencana Tata Ruang Wilayah Proipinsi (RTRWP)*.
- Pitana (1994). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Penerbit Bali Post.
- Rokhmin Dahuri dkk (2001). *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Penerbit PT. Pradnya Paramita.
- Rancangan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar (RTRWK) tahun 1994-2004.
- Suasthawa Dharmayuda (2001). *Desa adat, Kesatuan Masyarakat, Hukum Adat di Propinsi Bali*, Denpasar, Penerbit PT.Upada Sastra.
- Syarif Hidayat dan Darwin (2001). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* Jakarta PT. Pustaka Quantum.
- Singgih Santoso (2001). *SPSS Versi 10. Mengolah data statistik secara profesional*. Penerbit PT. Elex Media Komputindo kelompok Gramedia, Anggota IKAPI. Jakarta.
- Hadi, Sudharto P (2001). *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Hadi, Sudharto P (1999). *Manajemen Lingkungan Berbasis Kerakyatan dan Kemitraan*. Pidato pengukuhan pada Acara Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Manajemen Lingkungan dan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro. Semarang 12 Oktober 1999.
- ..... (1997). *Aspek Sosial Amdal, Sejarah Teori dan Metode*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- ..... (1997). *Metodologi Penelitian Sosial: Kuantitatif, Kualitatif dan kaji tindak*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sajidiman Surjohadiprodo (1997). *Wawasan dan Visi Pembangunan Abad -21*, editor M Dawam, Jakarta. PT. Intermasa.
- Sudjana (1996). *Metoda Statistika*. Penerbit Tarsito. Bandung..
- Singarimbun dan Effendi (1986). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. Suntingan Cetakan Pertama LP3ES.
- Wahyono Ary dkk. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta, Media Pressindo bekerjasama dengan Yayasan Adikarya Ikapi dan Ford Foundation.